

20/D/FOK/02/2017

EDISI REVISI

DIKTAT

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

OLEH

**IRMA YUSRIANI SIMAMORA, MA.
NIP 19751204 200961 2 002**

UNTUK KALANGAN SENDIRI



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

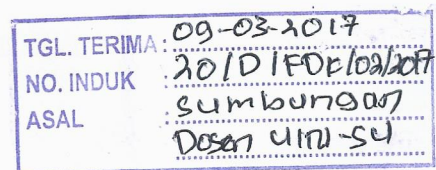
EDISI REVISI

DIKTAT

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN



OLEH



**IRMA YUSRIANI SIMAMORA, MA.
NIP 19751204 200901 2 002**

UNTUK KALANGAN SENDIRI



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

EDISI REVISI

DIKTAT

OLEH

**IRMA YUSRIANI SIMAMORA, MA.
NIP 19751204 200901 2 002**

KONSULTAN



**PROF. DR. H. SYUKUR KHOLIL, MA.
NIP 19640209 1989 03 003**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada yang maha sempurna, Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Diktat yang amat sederhana ini.

Diktat ini ditujukan khususnya untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) semester VII (tujuh), dan salah satu penunjang demi terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar di dalam kelas. Dalam penulisannya penulis berusaha menyesuaikan dengan materi yang menurut penulis memiliki keterkaitan dalam mata kuliah Komunikasi Pembangunan, dikarenakan belum terbitnya buku panduan kurikulum dan silabi mahasiswa 2010/2011, yang mana mata kuliah tersebut diberlakukan kepada mahasiswa ketika mereka berada pada semester VII (tujuh).

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan terutama dalam penyajian materi, untuk itu penulis dengan tangan terbuka dan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan diktat ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Diktat ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 15 Desember 2016

Penulis

Irma Yusriani Simamora, M.A

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I: PENGERTIAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	1
A. Pengertian Komunikasi	1
B. Pengertian Pembangunan	5
C. Pengertian Komunikasi Pembangunan	8
 BAB II: RUANG LINGKUP, TUJUAN, PRINSIP, STRATEGI DAN FUNGSI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	13
A. Ruang Lingkup Komunikasi Pembangunan	13
B. Tujuan Komunikasi Pembangunan	15
C. Strategi Komunikasi Pembangunan	18
D. Fungsi Komunikasi Pembangunan	20
 BAB III: PEMABANGUNAN SEJAK PARADIGMA LAMA HINGGA SEKARANG	26
A. Perbandingan Paradigma Pembangunan di Indonesia Pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi	26
B. Konsep Teoritis Komunikasi Pembangunan	40
C. Peran Komunikasi dalam Pembangunan	48
 BAB IV: KOMUNIKASI DAN MODERNISASI SERTA PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN	53
A. Konsep Modernisasi	53
B. Pembangunan Sebagai Proses Modernisasi	56
C. Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi	60
D. Tugas dan Peran Agen Perubahan	65

BAB V: PERAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI

PEMBANGUNAN 71

- A. Fungsi Media Massa dalam Masyarakat 71
- B. Penggunaan Media/Saluran Untuk Komunikasi Pembangunan 75
- C. Membuat Isi atau Pesan Komunikasi Pembangunan 82

BAB VI: TEORI AWAL PEMBANGUNAN 87

- A. Teori-Teori Pembangunan 87
- B. Teori Modernisasi 88
- C. Teori Sosiologi Pembangunan 91
- D. Teori Evolusi 92
- E. Tradisi dan Modernisasi 95
- F. Teori Fungsionalisme 96

BAB VII: KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM

PENERAPANNYA 98

- A. Bidang Pertanian 98
- B. Bidang Keluarga Berencana 103
- C. Bidang Pendidikan 107
- D. Bidang Kesehatan 108

BAB VIII: KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF

ISLAM 111

- A. Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Islam 111
- B. Etika dan Prinsip Komunikasi Pembangunan dalam Islam 114

DAFTAR PUSTAKA 123

BAB I

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

A. Pengertian Komunikasi

Komunikasi sebenarnya merupakan konsep yang susah didefinisikan atau pun ditafsirkan karena bersifat abstrak dan mempunyai berbagai makna. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *communication* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. *Communication* bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung dan hubungan antara mereka itu disebut bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti, komunikasi tidak berlangsung dan hubungan orang-orang tersebut tidak komunikatif.¹

Secara terminologis, para ahli komunikasi telah memberikan pengertian komunikasi sesuai dengan persepsi dan kerangka pemahaman mereka mengenai komunikasi. Para ahli komunikasi mendefinisikan proses komunikasi sebagai *knowing what he wants to communicate and knowing how he should deliver his message to give it the deepest penetration possible into the minds of his audience.*

¹ Onong Uchana Efendi. *Komunikasi, Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. ke-18, 2004), h. 2.

Artinya pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan dengan segala daya dan usaha agar pihak penerima mengerti, memahami, dan menerima gagsannya lewat pesan yang disampaikan.

Menurut Hovland, komunikasi merupakan proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk merubah tingkah laku orang lain.

Harold Laswell, seorang ahli ilmu politik dari Yale University, mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang, ide, gagasan, perasaan, dan pikiran kepada orang lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan *who says what in wich cxhannel ti whom with what effect?* (siapa, mengatakan apa, dengan saluran/media apa, kepada siapa, dan pengaruhnya bagaimana serta efek yang ditimbulkan).

Berdasarkan defenisi komunikasi yang diutarakan oleh Lasswell tersebut, tampak adanya sejumlah komponen atau unsur-unsur yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi:

1. *Source* atau komunikator: pihak yang menyampaikan pesan,
2. *Messages* atau pesan: sesuatu yang disampaikan,
3. *Channel* atau media : saluran yang digunakan dalam komunikasi,
4. *Receiver* atau komunikan: pihak yang menerima pesan.
5. *Effect*: dampak yang ditimbulkan.

Setiap unsur komunikasi di atas mempunyai peranan yang saling mendukung, sehingga dengan sendirinya proses komunikasi tersebut tercipta sebagai suatu sistem. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, pesan komunikasi harus jelas dan dimengerti oleh komunikan. Hal yang penting dalam komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya, yakni dampak kognitif; dampak afektif; dan dampak behavioral.

Dampak kognitif adalah dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Di sini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. Dengan lain perkataan, tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran komunikan. Dampak afektif lebih tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. Di sini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya; menimbulkan perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Dampak yang paling tinggi kadarnya adalah dampak behavioral, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan.

Dampak komunikasi diwujudkan dalam umpan balik komunikasi (*feedback communication*). Menurut Webb, Jr., umpan balik komunikasi ada empat kategori:

1. *Zero feedback*: umpan balik yang diterima dari komunikan oleh komunikator tidak dimengerti atau dipahami tentang apa yang dimaksudkan komunikan.

2. *Positive feedback*: umpan balik dimengerti dan diterima sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan persetujuan atau dukungan terhadap pesan yang termuat dalam komunikasi.
3. *Netral feedback*: informasi atau tanggapan yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator tidak relevan dengan masalah yang disampaikan komunikator.
4. *Negative feedback*: informasi yang diterima kembali oleh komunikator tidak mendukung atau mendapat tantangan dari komunikan yang datangnya berupa kritik terhadap pesan komunikator.

Komunikasi melibatkan sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing *human communication*, yang sering kali disebut komunikasi sosial atau *social communication*. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antarmanusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi masyarakat karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalannya.

Selain itu dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antarpersonal maupun antarmasyarakat agar terjadi keserasian dan mencegah konflik dalam lingkungan masyarakat. Dalam hubungan bilateral

antaranegara diperlukan juga komunikasi yang baik agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Pengertian Pembangunan

Kesulitan akan ditemui ketika mencari keseragaman dalam mendefinisikan pembangunan. Secara sederhana, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pengertian pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, *westernisasi*, pertumbuhan (*growth*), dan evolusi sosio-kultural. Istilah-istilah tersebut agak kurang sesuai dengan apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan sebagai pembangunan. Menurut Frey, pengertian pertumbuhan (*growth*) terlalu luas, sedangkan industrialisasi terlalu sempit. Begitu pula dengan istilah *westernisasi* yang bersifat parochial (sempit wawasan) dan meragukan. Istilah yang paling populer digunakan adalah modernisasi dan pembangunan yang menyebabkan kedua istilah tersebut sering disinonimkan.

Dalam membicarakan pembangunan sebagai suatu gejala sosial, maka di kalangan disiplin ilmu-ilmu sosial juga terdapat perspektif yang bervariasi. Di samping disiplin ekonomi, maka pembahasan mengenai pembangunan yang menonjol muncul pada disiplin-disiplin sosiologi, politik, dan psikologi. Dengan kompleksnya kehidupan itu sendiri, maka wajar saja bila interpretasi tentang makna

dan lingkup pembangunan menjadi beragam sesuai dengan latar belakang pengulasnya.

Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan dan secara terencana dan berkelanjutan, dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan sering dimengerti sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan bernegara.

Pada masa lalu, sikap kritis dan korektif masyarakat tidak memperoleh porsi seimbang karena dianggap menghambat laju pembangunan yang sedang didesain pemerintah. Model *topdown development* semacam ini pada kenyataannya telah gagal menghasilkan pembangunan yang menyentuh *sense of belonging* masyarakat di dalamnya. Terbukti lahir pembangunan yang menciptakan keterasingan sosial, nir partisipasi, kesenjangan antara daerah, dan pada akhirnya mengkristal dalam wujud pembangunan yang jauh dari *humanisme*.

Bahkan masyarakat kemudian memandang setiap pembangunan hanya akan mengorbankan kepemilikan masyarakat (terutama kaum pinggiran) demi pembangunan itu sendiri. Evaluasi negatif atas pembangunan demikian masih tersisa dalam perasaan skeptis bahkan menjadi apatis masyarakat yang dituangkan dalam bentuk penolakan, pembangkangan, dan ketidakpercayaan terhadap proses pembangunan yang bakal dijalankan pemerintah.

Konsep pembangunan menurut Everett M Rogers adalah bahwa pembangunan diterjemahkan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material untuk keuntungan sebagian besar masyarakat, dengan tetap memperhatikan lingkungannya. Pembangunan juga dipahami berkaitan dengan perubahan sosial, yang artinya pembangunan sebagai entitas yang diserahkan kepada pemerintah akan selalu bersentuhan dengan keberadaan masyarakat di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan ternyata membutuhkan partisipasi masyarakat baik sebagai stakeholders maupun subjek yang telah mempercayakan proses pembangunan pada pemerintah.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat perencanaan (perumusan kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian (pengawasan dan evaluasi) program pembangunan. Oleh sebab itu, muncul pembangunan partisipatif sebagai paradigma baru yang seharusnya dianut pemerintah ketika berharap pembangunan betul-betul memperoleh dukungan masyarakat yang *favourable*. Pembangunan sudah semestinya ditempatkan kembali sebagai *common interest* antara masyarakat dengan pemerintah.

Partisipasi sosial bukan lagi sekedar sikap diam dan menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada pelaku, namun bagaimana masyarakat dapat mengikuti sejak perencanaan, kontrol terhadap proses bahkan evaluasi

terhadap hasil pembangunan dalam suasana demokratis, terbuka dan linier antara masyarakat dan pemerintah. Sebab, apapun konsekuensi dari pembangunan tersebut akan kembali kepada masyarakat sekitarnya. Kesadaran masyarakat dapat muncul ketika pembangunan diposisikan sebagai entitas terbuka, korektif, dan sesuatu yang bersifat komunikatif. Artinya pembangunan tersebut dapat dibicarakan secara dialogis antara masyarakat dengan pemerintah sebagai *policy maker*, sehingga masyarakat merasa dimanusiakan dalam setiap tahapan proses pembangunan.

C. Pengertian Komunikasi Pembangunan

Seperti halnya pengertian komunikasi yang sangat beragam, pengertian komunikasi pembangunan pun mengalami keragaman. Walaupun demikian, penjelasan atau pengertian komunikasi pembangunan dapat ditelusuri dari beberapa pandangan ahli yang concern dengan komunikasi dan pembangunan. Mengaitkan pembahasan komunikasi dengan pembangunan sudah barang tentu kajiannya tidak lepas dari usaha penyebaran pesan-pesan (ide, gagasan dan inovasi) kepada sejumlah besar orang. Bagaimana suatu ide, gagasan atau inovasi pembangunan diperkenalkan, dijelaskan hingga menimbulkan efek tertentu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Tidak terkecuali persoalan-persoalan sosial budaya, politik, ekonomi, dan HAM, semuanya dapat dijelaskan dengan pendekatan komunikasi. Yang jelas, komunikasi dan pembangunan mempunyai keterkaitan memperbincangkan hal yang sama, yaitu tentang dimensi perubahan pada individu dan masyarakat.

Argumentasi apa pun yang mengusung tema pembangunan, membutuhkan sumber daya komunikasi untuk menumbuhkan keterlibatan dan partisipasi individu, serta kelompok dalam masyarakat. Berikut akan ditampilkan beberapa rumusan pengertian komunikasi pembangunan.

Menurut Peterson (2000), "Komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi, yang secara umum berlangsung dalam negara berkembang." Sejalan dengan Peterson, Quebral (1973) melihat komunikasi dalam pembangunan merupakan suatu tindakan yang bersifat pragmatis sehingga dia merumuskan, "Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara". Sedangkan rumusan yang lebih sederhana lagi dikemukakan oleh Widjaja A.W dan Hawab, serta Arsyik (1987). Mereka mengartikan komunikasi pembangunan sebagai komunikasi yang berisi pesan-pesan (*message*) pembangunan. Komunikasi pembangunan ini ada pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat, pemerintah dan negara, termasuk juga di dalamnya dapat berbentuk pembicaraan kelompok, musyawarah pada lembaga resmi, siaran, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi.

Kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah "*As an integral part of development, and communication as a set of variables instrumental in*

bringing about development" (Roy dalam Jayaweera dan Anumagama, 1987). Menyadari peran dan potensi komunikasi dalam pembangunan, para ahli komunikasi terilhami untuk mengkaji bidang ini. Seperti yang dikatakan W. Barnett Pearce (1986), "Sangat jelas bahwa komunikasi memegang peran penting dalam proses pembangunan. Para pakar pembangunan sejak awal cukup yakin bahwa mereka tahu bagaimana komunikasi bekerja dan apa perannya dalam pembangunan. Di India misalnya, beberapa dokumen menunjukkan komunikasi sebagai "perencanaan publitas". Sebuah proses linier mengalirnya informasi dari pemerintah ke masyarakat."

Berdasarkan pandangan dan kenyataan yang berkembang, menurut beberapa ahli, secara umum konsep komunikasi pembangunan dapat dirangkum menjadi dua perspektif pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit.

1. Pengertian Dalam Arti Luas

Penjelasan hubungan komunikasi dengan pembangunan dalam berbagai hal melibatkan masalah yang luas dan selalu menyentuh bidang-bidang spesialisasi lain seperti: komunikasi politik, komunikasi sosial budaya, dan kebijakan komunikasi. Ulasan yang dikemukakan Tehranain (1979) mengenai peranan komunikasi dalam pembangunan, merupakan bagian dari kebijakan komunikasi secara keseluruhan dari suatu negara. Sedangkan ulasan yang dikemukakan Pye (Nasution, 2004) mengenai peranan komunikasi dalam pembangunan, merupakan bagian dari tinjauan

komunikasi politik dalam masyarakat. Dalam pengertian yang luas ini, dapat digolongkan berbagai pendekatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang mengupas masalah relasi dan interelasi komunikasi dengan pembangunan. Singkatnya, komunikasi dalam arti yang luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang menonjol dari bahasan ini dikemukakan Pool (1963), Pye (1963), Tehranian (1963), Rogers (1963), Schramm (1964), Deutsch (1969), Lerner (1974), dan Dissanayake (1982), yakni meletakkan dasar bagi suatu pendekatan yang bersifat global dan makro (Nasution, 2004). Dari penelitian yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka telah meletakkan landasan pendekatan pembangunan dengan penekanan pada komunikasi.

2. Pengertian Dalam Arti Sempit

Dalam arti sempit pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada konteks ini, komunikasi pembangunan dilihat sebagai rangkaian usaha mengomunikasikan pembangunan kepada masyarakat, agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu

bangsa. Usaha tersebut mencakup studi, analisis, promosi, dan evaluasi teknologi komunikasi untuk seluruh sektor pembangunan. Pengertian ini tercermin dalam sejumlah kegiatan sistematis yang dilakukan oleh berbagai badan, dan lembaga yang bersifat lokal, nasional maupun internasional dalam menyebarkan gagasan pembangunan kepada khalayak ramai.

Menurut Academy Educational Development (1985) dalam Nasution (2004), komunikasi pembangunan selama ini selalu bersifat elektrik atau merupakan kumpulan dari berbagai disiplin ilmu: desain instruksional, jurnalisme, periklanan, pemasaran, teknik, psikologi behavioral, antropologi, teater, dan seni visual untuk memproduksi program komunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, PRINSIP, STRATEGI

DAN FUNGSI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

A. Ruang Lingkup Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan.

Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang tidak elastik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara.

Komunikasi pembangunan merupakan salah satu terobosan (*break trough*) di lingkungan ilmu sosial. Seperti mana terobosan lainnya, komunikasi pembangunan pada dasarnya merupakan gagasan dan konsep yang tidak mudah diapresiasi atau dipahami sampai kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan. Komunikasi

pembangunan merupakan inovasi yang harus diusahakan agar diketahui orang dan diterima, sebelum ia digunakan.

Jika melihat rumusan di atas, tidak begitu jelas apa yang membedakan komunikasi pembangunan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Bahkan lebih terasa persamaannya dengan beberapa bentuk aktivitas komunikasi yang lebih dikenal selama ini. Hal ini ada benarnya, karena memang komunikasi pembangunan pada dasarnya memiliki banyak sekali persamaan dengan bentuk-bentuk kegiatan komunikasi yang lain, seperti periklanan, komunikasi massa, komunikasi politik maupun komunikasi sosial.

Pengamatan terhadap perkembangannya sejak awal hingga sekarang, maka konsep pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.

Komunikasi pembangunan dalam arti sempit merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

B. Tujuan Komunikasi Pembangunan

Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosio-ekonomi yang rendah, haruslah diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal, dalam jangka yang singkat. Mereka juga mesti diberi motivasi.

Hal ini dinyatakan oleh Nora C. Quebral:

The purpose of development communication is to advance development. Development requires that a mass of people with low rate of literacy and income, and the socio-economic attributes dhat go with it, fist of all be informed about and motivated to accept and use a sizable body of hitherto unfamiliar ideas and skills in very much less time than that process would normally take.

(Tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan yang berkeseluruhan. Pembangunan menginginkan bahwa sekelompok massa orang-orang dengan tingkat literasi (melek huruf) dan penghasilan rendah, dan atribut-atribut sosio-ekonomi bahwa mereka harus berubah, pertama-tama semua menjadi terbuka tentang informasi dan dimotivasi untuk menerima dan menggunakan secara besar-besaran ide-ide dan keterampilan-keterampilan yang tidak familiar dalam waktu singkat dibanding proses yang diambil dalam waktu normal).

Rogers dan Adhikarya (1978) menyarankan perlunya dirumuskan suatu pendekatan baru dalam proses komunikasi antarmanusia, yaitu suatu pendekatan konvergensi yang didasarkan kepada model komunikasi yang sirkuler, menggantikan model linier yang umumnya dipakai selama ini. Menurut kedua ahli itu, pendekatan konvergensi berarti berusaha menuju suatu pengertian yang lebih bersifat timbal balik di antara partisipan komunikasi dalam hal pengertian, perhatian, kebutuhan ataupun titik pandang.

Selain itu, diketengahkan pula perlunya ditingkatkan partisipasi semua pihak yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi, demi tercapainya suatu fokus bersama dalam memandang permasalahan yang dihadapi. Dengan perkataan lain, pendekatan ini bertolak dari dialog antar semua pihak, dan bukan seperti selama ini hanya atau lebih banyak ditentukan oleh salah satu pihak, biasanya komunikator saja.

C. Prinsip-prinsip Komunikasi Pembangunan

Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, tentunya harus mempertimbangkan hal-hal disorot tadi. Kesenjangan efek yang ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi selama ini, menurut Rogers dan Adhikarya (1978) dapat diperkecil bila strategi komunikasi pembangunan dirumuskan demikian rupa, mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penggunaan pesan yang dirancang khusus (*tailored messages*) untuk khalayak yang spesifik. Misalnya, bila hendak menjangkau khalayak miskin pada perumusan pesan, tingkat bahasa, gaya penyajian, dan sebagainya, disusun begitu rupa agar dapat dimengerti dan serasi dengan kondisi mereka.
2. Pendekatan *ceiling effect* yaitu dengan mengomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang tidak dituju, katakanlah golongan atas, merupakan "redundansi" (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka) atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang

hendak dijangkau. Dengan cara ini dimaksudkan agar golongan khalayak yang benar-benar berkepentingan tersebut mempunyai kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya, dan dengan demikian diharapkan dapat mempersempit jarak efek komunikasi yang telah disinggung di atas tadi.

3. Penggunaan pendekatan *narrow casting* atau melokalisasi penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak. Lokalisasi di sini berarti disesuaikan penyampaian informasi yang dimaksud dengan situasi kesempatan di mana khalayak berada.
4. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat.
5. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*), dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengomunikasikan pesan-pesan pembangunan.
6. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri.
7. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalayak, sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri, dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya.

E. Strategi Komunikasi Pembangunan

Menurut AED (1985), ada empat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu:

1. strategi-strategi berdasarkan media (media-media strategis)
2. strategi-strategi desain intruksional
3. strategi-strategi partisipatori
4. strategi-strategi pemasaran

Masing-masing strategi mencerminkan suatu rangkaian prioritas tertentu mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Kategori ini sendiri tidak dimaksudkan dalam arti yang kaku, karena dalam kenyataannya bukan sedikit program komunikasi pembangunan yang merupakan gabungan dari beberapa strategi.

Strategi berdasarkan media: para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka sukai. Strategi ini memang merupakan tehnik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang efektif. Strategi media ini secara umum memulai rencananya dengan mempertanyakan: "Apa yang dapat saya lakukan dengan mempergunakan radio?" Bagaimana caranya agar saya dapat menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan saya?. Sejumlah penelitian yang diarahkan pada strategi media tertentu telah dilakukan terutama untuk mengetahui: "Media manakah yang terbaik?" "Media apakah yang termurah biayanya?." "Media apakah yang terbaik

untuk mempopulerkan, mengajarkan, memantapkan, atau mengingatkan sesuatu hal?"

Strategi desain intruksional: yang menggunakan strategi ini pada umumnya adalah pendidik. Mereka memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu-individu yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Strategi kelompok ini, mendasarkan diri pada teori-teori belajar formal, dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pengembangan bahan-bahan (material) belajar. Berkat keikutsertaan kalangan pendidikan tersebut di lapangan kegiatan ini, banyak pemahaman yang diperoleh mengenai evaluasi formatif, uji coba, desain program berjenjang (*sequenced program design*) dan sebagainya.

Para desainer intruksional merupakan orang-orang yang berorientasi rencana dan sistem (*plan and sistem oriented*). Yang pertama dilakukan adalah:

1. kriteria yang hendak dicapai
2. kriteria keberhasilan
3. partisipan
4. sumber-sumber (*resources*)
5. pendekatan yang digunakan, dan
6. waktu

sebagai faktor-faktor yang ditimbang, dianalisis, distrukturkan, dan dimodifikasi dalam suatu petunjuk rencana. Secara umum kegiatan mereka dapat

2010/EDK/02/2017



digolongkan ke dalam tiga tahapan yang luas dan saling berkaitan yakni: perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Strategi partisipasi: dalam strategi partisipasi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat (*equal*) dalam proses berbagai pengetahuan dan keterampilan.

Strategi pemasaran: strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. "kalau anda dapat menjual pasta gigi, mengapa tidak dapat menjual kesehatan, pertanian, dan keluarga berencana?" Itulah prinsip *social marketing* yang menjadi pegangan strategi ini.

F. Fungsi Komunikasi Pembangunan.

Komunikasi pembangunan bersifat timbal balik mementingkan adanya dialog antara kedua belah pihak yang memberikan penerangan atau yang menyampaikan pesan dengan pihak yang menerima pesan penerangan, dan antara khalayak sendiri. Dengan demikian, maka komunikasi sosial dan komunikasi dilaksanakan secara bebas, terbuka, terarah, jujur dan bertanggung jawab. Keberhasilannya sangat

bergantung dari adanya iklim yang diliputi saling percaya memercayai antara pemerintah dan masyarakat dan adanya itikad baik atas dasar kepentingan nasional.

Arus penerangan bukan saja mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas dalam bentuk umpan balik. Untuk itu kegiatan-kegiatan komunikasi sosial dan pembangunan yang bersifat timbal balik harus dikembangkan antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah dan antara golongan-golongan dalam masyarakat sendiri.

Fungsi apa sajakah yang seharusnya dilaksanakan oleh komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk memperoleh gambaran singkat, mari kita telusuri beberapa konsep yang pernah dimunculkan komunikasi dalam rangka kegiatan besar yang bernama pembangunan. Hedebro (1979) mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya:

1. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media komunikasi dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Disini yang menjadi fokus studi adalah politik dan fungsi media massa, atau istilah sekarang dinamakan dengan kebijakan komunikasi.
2. Pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun jauh lebih spesifik. Menurut pendekatan ini, media dilihat sebagai pendidik atau guru, dan idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada

masyarakat bermacam keterampilan, dan dalam kondisi tertentu mempengaruhi sikap mental dan perilaku mereka.

3. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi kepada suatu komunitas lokal atau desa. Konsentrasinya adalah memperkenalkan ide-ide baru, produk dan cara-cara baru dan penyebarannya di suatu desa atau satu wilayah.

Kebanyakan teori-teori pembangunan selama ini, ternyata dikembangkan dalam tradisi teori pertumbuhan ekonomi, yaitu berisi gambaran mengenai proses perubahan ekonomi yang telah berlangsung di negara-negara maju. Titik tolak teori tersebut selalu bermula dari memperbedakan faktor-faktor dasar produksi yang sudah kesohor yakni: tanah, modal dan tenaga kerja.

Dalam karyanya yang kini tergolong klasik, Schramm (1964) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian kepada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi-aspirasi nasional.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi

kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.

3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan-pembangunan, sejak orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga ketrampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Media massa, menurut Schramm, secara sendirian ataupun bersama lembaga lain dapat melakukan fungsi-fungsi yang berikut ini:

1. Sebagai pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat waktu seperti yang diharapkan oleh suatu negara yang sedang membangun.
2. Pembuatan keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebagai penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan, dan media massa menyampaikan bahan untuk didiskusikan serta memperjelas masalah yang sedang diperbincangkan.
3. Sebagai pendidik. Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa, sedangkan bagian lainnya dikombinasikan dengan komunikasi antarpribadi. Misalnya program-program pendidikan luar sekolah, atau siaran pendidikan.

Catatan tentang peranan komunikasi dalam pembangunan ini masih dapat diperpanjang. Terutama karena semakin kompleksnya tuntutan pembangunan itu

sendiri. Dari berbagai ulasan yang dikemukakan para ahli, Hedebrö (1979) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, yakni:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai dari baca tulis ke pertanian, hingga keberhasilan lingkungan, hingga reparasi mobil.
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang *mobile*.
5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.
6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi.
7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat.
8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Mereka yang peroleh informasi, akan menjadi orang yang berarti, dan para

pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.

9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.
10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik.
11. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri.

Dalam usaha mengatasi akibat-akibat sampingan dari pembangunan itu sendiri, maka komunikasi sosial dengan tujuan Wawasan Nusantara perlu ditingkatkan. Hanya melalui komunikasi sosial demikianlah, suatu integrasi bangsa dapat diharapkan dalam proses pembangunan yang makin maju dan berhasil ini.

BAB III

PEMBANGUNAN SEJAK PARADIGMA LAMA HINGGA SEKARANG

A. Perbandingan Paradigma Pembangunan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Pada bagian ini, kita akan membahas sedikit tentang pandangan kritis yang berkembang pada paradigma awal pembangunan yang dominan. Hal ini dipandang perlu sebagai suatu dasar yang baik untuk diskusi agar kita mampu menilai kekurangan dan kelemahan dari beberapa teori dan gagasan yang ada di dalam proses pembangunan. Menurut Lerner:

“Pembangunan sebagai suatu ideologi internasional yang bermula dari suatu komunikasi” (Lerner dalam Huntington, 2003).

Tulisan Lerner tersebut, jelas ditegaskan bahwa istilah pembangunan merupakan suatu ideologi yang berawal dari proses komunikasi. Ideologi yang dimaksud, yakni sebuah paham atau aliran pemikiran yang mengandung misi atau kepentingan tertentu, yang dimaknai sebagai keseluruhan proses komunikasi. Artinya, melalui tindakan komunikasi yang persuasif, bahkan doktrinasi sekalipun, negara-negara maju yang jelas berpaham kapitalis berusaha membujuk dan mempengaruhi negara-negara tertentu untuk mengikuti pandangan mereka. Dengan cara ini negara-negara maju akan mempunyai cukup waktu untuk mengindoktrinasi bahkan mendikte negara lain melalui dogma-dogma yang dikembangkan. Di banyak

negara cara ini dipandang sebagai resep mujarab bagi tuntutan ke arah perubahan. Perubahan dimaksud mengarah pada penguatan dan pemberdayaan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat, termasuk terwujudnya kelangsungan pemerintahan negara.

Dalam pengertian politik, ideologi berarti seperangkat ide atau kekhususan definisi realitas yang muncul dari atau melekat terhadap kepentingan yang sangat kuat. Akibatnya, konsep ini membawa permasalahan baru bagi pembangunan itu sendiri. Pembangunan berubah menjadi bola liar yang sulit dijinakkan, perkembangan masyarakat menjadi lamban bahkan termarginalkan dan negara semakin menjadi terbelakang. Mencermati keadaan ini, ada dua pemikiran yang menjadi perhatian. Yakni, pertama, banyak pihak menilai konsep tersebut sebagai upaya memisahkan masyarakat dari akar sejarah dan konteks sosialnya. Kedua, negara akan berkembang dalam kontrol kepentingan tertentu sehingga membuka ruang munculnya ketergantungan negara.

Di Indonesia, sebagian masyarakat akhirnya tidak mampu bersikap kritis terhadap pemahaman dan permasalahan yang dihadapinya. Sebaliknya, negara dalam hal ini para elit politik sibuk dengan urusan kepentingan masing-masing. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi keyakinan kelompoknya sering kali melahirkan stereotif dan pandangan yang impewrior terhadap kelompok lain.

Sebagai contoh kasus, di Indonesia dampak dari fenomena ini telah memicu berbagai permasalahan baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun politik serta

menimbulkan gejolak krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Pada Orde Baru, di Indonesia banyak bukti memperlihatkan bahwa pada prakteknya di lapangan berbagai program pembangunan sering mentranplantasikan dan menafikan pranata-pranata lokal sehingga yang terjadi selain perubahan sosial secara drastis dalam arti fisik juga kesenjangan sosial. Proses marginalisasi yang bermuara pada perlawanan sosial masyarakat. Sampai saat ini dampak krisis tersebut terus berlangsung dan tampaknya pemerintah belum bisa keluar dari permasalahan ketergantungan ini. Ironisnya, ketika krisis moneter dan ekonomi terjadi, semua kritik ilmu sosial ditujukan kepada kekeliruan kebijakan pembangunan saja, tanpa disertai solusi yang meyakinkan. Tokoh-tokoh seperti Gusdur, Megawati hingga Susilo Bambang Wudhoyono yang tampil sebagai presiden dan dikenal sebagai kritikus pembangunan kapitalis tidak satu pun mampu mengeluarkan negara dari lilitan ketergantungan bahkan kondisi ini menumbuhkan bentuk imperealisme budaya dan kolonialisme yang mengglobal. Akibatnya menurut Hoshima, teknologi yang pada modal tidak bisa menaikkan tingkat produktivitas dan tingkat pendapatan karena terlalu mahal dan canggih untuk kelompok masyarakat (Nasution, 2004: 81).

1. Orde Lama

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Orde Lama memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Politik maju dan binger, tetapi ekonomi terpuruk. Semangat mengisi kemerdekaan sangat tinggi namun belum memiliki panduan operasional yang kokoh. Nasionalisme terbina sangat kuat akan tetapi sentralisme

kekuasaan tidak dapat terbendung. Bung Karno sebagai representasi orde lama memang merupakan politisi dunia yang retorikanya mampu menyatukan rakyat dalam kesatuan perlawanan, baik menghadapi imperialisme maupun gerakan separatisme. Sayangnya, kemampuan di atas rata-rata tersebut menghasilkan pemerintahan yang kurang peduli pada kebutuhan dasar rakyatnya. Singkatnya, walaupun ada Bung Hatta yang manajerial, kebutuhan sandang, papan dan pangan dinomorduakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pada masa pemerintahan era Orde Lama, pemerintah lebih mengedepankan keberadaan politik Indonesia.

Hal ini dapat dimaklumi, sebab pada masa tersebut Negara Indonesia baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Adalah bahwa tidak mungkin suatu negara dapat mensejahterakan rakyatnya terutama dalam bidang ekonomi jikalau keadaan politik di negara tersebut tidak aman. Oleh karena itu, era pemerintahan Presiden Soekarno lebih mengutamakan stabilitas politik dibandingkan pembangunan di bidang ekonomi. Terlebih, pada masa tersebut merupakan masa kelam bagi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Begitu banyaknya pergulatan konflik dan pemberontakan yang terjadi di wilayah NKRI semakin membuat konsentrasi pemerintah hanya tertuju pada penyatuan Indonesia dan peningkatan stabilitasi politik.

Tak banyak yang dapat dituliskan mengenai perkembangan ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama. Perekonomian terpuruk sehingga menyebabkan rakyat menjadi menderita. Banyak ditampilkan dalam film-film

perjuangan zaman kemerdekaan ketika rakyat hanya memakai pakaian yang berasal dari karung goni dan makan makanan seadanya karena perekonomian rakyat yang terpuruk. Hal tersebut menyebabkan stabilitas perekonomian baik makro maupun mikro menjadi terhambat sehingga secara keseluruhan keadaan perekonomian Indonesia sangatlah memprihatinkan. Inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri senilai 2,5 miliar dolar.

Menurut Emil Salim, laju inflasi menjelang peristiwa G-30-S/PKI bisa dikatakan sangat tidak masuk akal. Indeks biaya hidup di tahun 1960 sampai tahun 1966, naik hingga mencapai 438 kali. Harga beras naik dengan kilat hingga mencapai 824 kali, begitu pula harga tekstil yang naik pesat hingga 717 kali. Sementara itu, nilai rupiah semakin terpuruk dari angka Rp. 160 saja menjadi Rp. 120 ribu per satu dolar AS. Angka-angka tersebut menjadi bukti ilustratif betapa malapetaka yang menghantam bangsa Indonesia saat itu demikian dahsyat. Hal tersebut diperparah oleh tragedi pergulatan politik nasional yang mencapai puncaknya pada peristiwa Gerakan 30 September/PKI, yang membuat bangsa Indonesia dalam kondisi *chaos*.

2. Orde Baru

Orde Baru lahir dengan tujuan untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama Orde Lama memerintah. Gagasan dan pikiran Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi permasalahan yang timbul selama Orde Lama

memerintah dapat segera teratasi. Dengan demikian lahirlah pemerintahan teknokratis yang bertumpu pada empat hal penting. Yang pertama adalah gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan jawaban atas kemiskinan dan pengangguran dan kemudian menjadi syarat mutlak bagi lahirnya stabilitas politik. Intinya, kemiskinan ekonomi adalah sumber terjadinya instabilitas politik yang diwarisi rakyat banyak dari Orde Lama. Kemiskinan bukan dijawab dengan politik tetapi pembangunan. Rakyat lapar bukan diberi hak suara tetapi nasi. Di sini lah dikenal "politik pangan/beras" sebagai solusi dari keadaan ekonomi yang terpuruk. Kedua, yaitu visi politik sebagai panglima dirubah dengan ekonomi sebagai panglima. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas dan acuan keberhasilan pemerintahan. Artinya, pembangunan politik dan ekonomi tetap dilakukan tetapi secara bertahap dan melalui mekanisme konsensus agar kesejahteraan segera dapat tercapai. Konsensus-konsensus politiklah yang membuat demokrasi seakan-akan tidak mendapat waktu dan tempat yang luas pada masa Orde Baru. Kritik umum pada Orde Baru adalah, mereka benar dalam kebijakan ekonomi tetapi kurang memuaskan dalam kebijakan politik.

Yang ketiga adalah visi negara kesejahteraan [*welfare state*] yang ditopang oleh pemerintahan yang kuat. Visi ini berangkat dari pertanyaan, apa makna merdeka jika masih menderita. Bukankah kemerdekaan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk meningkatkan kemampuan diri agar dapat bersaing dengan negara-negara yang

lain. Manusia ideal Indonesia, manusia yang mengisi kemerdekaannya dengan kehidupan yang penuh dengan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Keempat, visi negara integralistik dan kekeluargaan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan-keputusan penting. Hal ini didasarkan pada semangat konsensus politik dan bukan pada kontrak politik. Semangat konsensus politik menginginkan adanya suatu empati dalam masyarakat apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu semangat yang antisipatif dengan mengambil nilai terendah dari tindakan. Artinya, kesuksesan memang tujuan, tetapi ketidaksiuksesan juga harus ditanggung bersama. Ini membedakan dengan kontrak politik yang mengangankan pada kesuksesan bersama tanpa ragu. Artinya kesuksesan sebagai tujuan dan tidak memikirkan kekalahan. Nilai kontrak politik berangkat dari nilai tertinggi, positifitas dan tidak ada ruang bagi kesalahan. Hasilnya, Orde Baru secara meyakinkan dapat mengurangi kemiskinan secara drastis dari 60% menjadi 14%. Lapangan pekerjaan meluas sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Stabilitas politik terjadi dan demokratisasi secara bertahap dapat dikonsolidasikan. Kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan mudah dan murah.

Dua orde telah kita lewati. Fase-fase berikutnya adalah Orde Reformasi yang lahir bersama terjadinya krisis ekonomi. Satu fase yang dihadirkan dengan semangat nilai berdemokrasi tetapi panik dalam implementasi. Banyak hal tak terbayangkan lahir pada fase ini. Politik berbiaya tinggi, merosotnya wibawa pemerintahan,

melemahnya negara, sampai terasingnya warga dari seluruh sendi-sendi bangsa. **Kekuasaan** sebagai alat, bukan kekuasaan sebagai cita-cita akhir.

Laporan Fokus (Kompas, 17/1/2004) tentang Kisruhnya Politik Pangan banyak menguak tabir persoalan pangan dan pertanian di Indonesia yang tak pernah selesai dari dulu hingga sekarang. Beberapa narasumber telah menyoroti akar persoalan dari mulai kebijakan produksi, impor, keterbatasan lahan, sampai pada kelembagaan di sektor pertanian. Namun, keseluruhan pandangan itu belum secara tegas menyatakan jalan apa yang harus ditempuh Indonesia dalam membenahi masalah pangan dan sektor pertanian. Sebagian lebih menggunakan pendekatan produksi, pasar, dan mekanisme perdagangan yang selama ini menjadi bagian dari paradigma pembangunan pertanian di masa Orde Baru (Orba). Pada awal tahun 1970, paradigma pembangunan pertanian di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Sebagai penyangga, yang terpenting bagi pemerintahan Orba adalah bagaimana mendongkrak produksi pangan dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan tidak berisiko secara politik. Pilihan ini sebagai antitesis program land reform di masa Orde Lama (Orla) yang dijadikan landasan utama dalam program pembangunan pertanian semesta. Kebetulan pada saat bersamaan arus global politik-

ekonomi dunia memperkenalkan revolusi hijau sebagai lawan dan alternatif revolusi merah.

Orba yang sejak kelahirannya menganut ideologi ekonomi kapitalis cenderung melaksanakan pembangunan pertaniannya melalui by-pass approach (jalan pintas), yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria (pembaruan agraria). Karena itu, pembangunan di Indonesia oleh Rohman Sobhan (1993) disebut sebagai *development without social transition* (Wiradi, 1999).

Perubahan paradigma ini menciptakan missing link dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke periode lain. Pertanian tidak lagi dipandang dalam aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekadar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Tanah sebagai alas pembangunan pertanian tidak dianggap sebagai faktor yang penting. Persoalan mengenai keterbatasan lahan petani yang hanya memiliki rata-rata 0,25 hektar, menurut Syaiful Bahari, Bimas Ketahanan Pangan, dapat diatasi dengan melaksanakan non-land based development (Kompas, 17/1/2004), bukannya dengan merombak dan menata kembali struktur penguasaan tanah yang lebih adil dan merata melalui reformasi agraria. Cara pandang seperti ini merupakan cermin jalan pintas yang mendominasi kebijakan dan strategi pembangunan pertanian sejak masa Orba hingga sekarang.

Keberhasilan Orba dalam swasembada pangan terutama beras pada tahun 1986 tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai kebenaran paradigma dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan Survei

Agro Ekonomi (SAE) dan lembaga-lembaga lain menunjukkan, justru di saat produksi beras mencapai titik puncak, jumlah petani gurem kian meningkat dari 50,99-persen menurut Sensus Pertanian 1983-menjadi 51,63 persen tahun 1993 dan berdasarkan sensus tahun 2003 terjadi peningkatan 2,6 persen per tahun. Hasil penelitian di tingkat mikro di beberapa desa memperjelas keterkaitan antara kepemilikan lahan, tingkat kemiskinan, dan kerawanan pangan. Kelompok masyarakat paling miskin dan rawan pangan di pedesaan adalah petani gurem dan buruh tani. Kelompok yang paling diuntungkan selama zaman emas adalah kaum industrialis. Kebijakan politik-ekonomi Orba menggunakan surplus pertanian guna mensubsidi sektor industri lewat politik pangan murah untuk menjaga stabilitas upah buruh demi mempercepat proses industrialisasi.

Di beberapa negara seperti China dan Korea Selatan, strategi itu digunakan. Namun, ketika industri telah menghasilkan surplus, sebagian keuntungan diembalikkan lagi ke sektor pertanian. Hal inilah yang tidak terjadi di Indonesia. Kasus Indonesia, setelah pertanian diperas habis kemudian ditinggalkan begitu saja. Surplus industri justru digunakan untuk mengkonsumsi barang mewah, pembangunan properti, dan sebagian lagi dibawa lari ke luar (capital outflow). Pertanian hanya ditempatkan sebagai subordinasi sektor industri sehingga tidak pernah terjadi transformasi sosial-ekonomi di pedesaan maupun tingkat nasional.

Persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi, akan tetapi juga persoalan mengenai daya dukung sektor pertanian yang komprehensif.

Ada empat aspek yang menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah; (2) akses input dan proses produksi; (3) akses terhadap pasar; dan (4) akses terhadap kebebasan. Dari keempat prasyarat itu yang belum dilaksanakan secara konsisten adalah membuka akses petani dalam kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam berproduksi. Pemerintah hingga kini selalu menghindari kedua hal itu karena dianggap mempunyai risiko politik tinggi. Kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan pada produksi dan pasar. Padahal, apabila kita bercermin pada kisah sukses pembangunan pertanian di Jepang, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, China, dan Vietnam, semuanya tidak terlepas dan diawali dengan perombakan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang melalui program reformasi agraria. Reformasi agraria sendiri mencakup redistribusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani, penataan produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan atau organisasi petani dalam bentuk koperasi atau asosiasi petani, dan proteksi terhadap produk-produk pertanian.

Keberhasilan negara-negara tersebut dalam pelaksanaan reformasi agraria telah memberikan landasan yang kuat untuk menempuh jalan industrialisasi dan transformasi sosial-ekonomi dalam skala nasional. Dapat disimpulkan bahwa, reformasi agraria hingga kini adalah jalan terbaik bagi negara-negara agraris seperti Indonesia untuk melakukan transformasi sosial-ekonomi dan membangun fondasi

ekonomi nasional yang kokoh. Namun sayangnya, isu reformasi agraria di Indonesia masih menjadi hal yang menakutkan sebab dianggap sebagai warisan konflik berdarah tahun 1965. Selain itu, keberadaan pemerintah yang masih percaya dengan konsep non-land based development sebagai cara efektif untuk mengatasi krisis pangan dan sektor pertanian. Kita hanya bisa membanggakan kesuksesan negara-negara Asia yang disebutkan di atas tanpa melihat konteks sejarahnya.

Sebenarnya, sudah sejak lama masalah ketimpangan penguasaan tanah ini terjadi, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Persoalan ini merupakan warisan kolonial Belanda yang belum pernah terselesaikan hingga kini. Program land reform yang dilaksanakan pertengahan tahun 1960-an akhirnya kandas di tengah jalan seiring perubahan sistem politik dan ekonomi yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Orde Baru.

3. Masa Reformasi

Pelaksanaan negara demokrasi adalah pelaksanaan negara kekeluargaan yang bertumpu pada pelayanan rakyat, bukan pelayanan pada kapitalisme global. Yaitu dengan mendahulukan kepentingan bangsa sendiri dibandingkan dengan kepentingan bangsa asing. Pemerintahan yang terjadi pasca Orde Baru diwarnai dengan jatuh banggunya tiga pemerintahan yang berkuasa. Ketiga pemerintahan itu adalah Habibie (1998-1999), Gus Dur (1999-2001), dan Megawati (2001-2004). Pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perubahan yang sedikit berarti. Mulai

bangkitnya perekonomian swasta yang sempat terhenti oleh laju krisis moneter pada 1998 menimbulkan secercah harapan bagi masyarakat. Iklim perekonomian yang kembali sehat, tumbuhnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya kembali di Indonesia, serta privatisasi BUMN agar menjadi mandiri merupakan salah satu langkah awal program pemerintah untuk merevitalisasi struktur perekonomian. Peningkatan devisa serta naiknya indeks pertumbuhan ekonomi ialah salah satu contoh sukses kecil pemerintah. Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat tidak dibarengi dengan stabilitas politik yang handal. Banyaknya kasus kekerasan, perang antar suku, kasus SARA, dan kejahatan teroris menyebabkan Indonesia kurang mampu mengoptimalkan teori "*trickle down effect*". Yaitu, dengan meningkatkan kemakmuran di bidang ekonomi diharapkan dapat mempengaruhi (merembes) bidang lainnya hingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, menurut hipotesa Sofian Effendi (2004), gagasan negara kekeluargaan harus dihidupkan kembali. Amandemen UUD 1945 yang telah meninggalkan gagasan tersebut dan menggantinya dengan "liberalisme" adalah tindakan yang mengingkari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Reformasi harus menemukan bentuk kehidupan yang cocok dengan watak asli rakyat kita. Watak dan nilai musyawarah mufakat, bukan voting dan jual beli suara. Watak kekeluargaan dan integralistik, bukan keningratan dan individualisme. Reformasi dimaknai sebagai meritokrasi (capaian-capaian keberhasilan) karena usaha dan kerja keras. Reformasi meliputi kesadaran sejarah ala Bung Hatta [1949] yang mengucapkan bahwa

menjadi aparatur pemerintah adalah menjadi "panitia kesejahteraan rakyat". Reformasi juga harus meneguhkan kembali demokrasi ekonomi yang berujung pada pasar sosial. Satu ordo ekonomi yang menguatkan fungsi dan kapasitas negara sehingga ramah dan bersahabat dengan pasar tanpa melupakan fungsi sosialnya. Hal ini dikarenakan, tesis Juan J. Linz dan Alfred Stepan [2001] menyebut bahwa "belum pernah ada, dan hampir pasti tidak mungkin ada, negara demokratis-modern yang terkonsolidasi dengan rezim ekonomi pasar murni." Oleh karena itu, negeri ini terlalu murah harganya apabila harus menjadi penyokong ideologi neo-liberalisme yang anti rakyat dan anti negara kuat.

Apalagi pada kenyataannya, neo-liberalisme hanya bertumpu pada pertumbuhan dan kurang tegas dalam pemerataan. Padahal seharusnya, konsep pemerataan dalam landasan ekonomi kekeluargaan adalah dengan mempersamakan hak rakyat di bidang ekonomi dan politik. Reformasi seyogyanya juga mengatur kembali masalah kependudukan. Hal ini karena kependudukan sangat berkait dengan tiga problem besar bangsa ini; yakni pengangguran, kemiskinan dan kekerasan. Oleh karena itu, penata-aturan kependudukan yang baik akan memudahkan tercapainya beberapa target pembangunan yang bertujuan pada pewujudan cita-cita bangsa.

Mengutip Haryono Suyono [2006] kenaikan produksi (pangan) tidak ada artinya apabila ledakan penduduk terjadi lebih deras. Oleh sebab itu, maka pertumbuhan penduduk harus dikelola dengan baik dan seandainya tidak dapat diatur maka hal itu harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan

prasarana kesehatan serta sosial. Hal ini dikarenakan hanya dengan pertumbuhan dan pemerataan kualitas ekonomi, pendidikan serta kesehatan, penduduk baru dapat merasa sama dan sederajat dengan warga lainnya.

B. Konsep Teoritis Komunikasi Pembangunan

Kesukaran untuk menyusun pengertian “komunikasi pembangunan” secara definitif, adalah sama peliknya dengan merumuskan secara persis: “apa yang dimaksud dengan pembangunan itu sendiri”. Kesulitan itu muncul terutama disebabkan luasnya makna yang tercakup dalam pengertian-pengertian mengenai kedua hal tersebut. Komunikasi mempunyai arti yang begitu luas. Pada saat yang sama, dengan mudah dapat dilihat dan dirasakan betapa kompleks dan menyeluruhnya rentang cakupan masalah pembangunan itu sendiri.

Karena itu setiap pembahasan yang menyangkut komunikasi dan pembangunan dengan sendirinya menanggung risiko luasnya permasalahan yang hampir-hampir tidak terbatas itu. Namun meski begitu, perlu dicarikan jalan keluar agar tercapai suatu kesamaan pengertian mengenai pokok bahasan ini, sekurangnya bagi keperluan pengkajian di lingkungan keilmuan.

Pembahasan masalah komunikasi dalam kaitannya dengan pembangunan dalam kepustakaan komunikasi dan disiplin lain yang berkaitan seperti sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan yang lainnya, seringkali muncul dengan judul yang berbeda-beda. Berbagai kajian tersebut biasanya menggunakan topik-topik seperti:

“komunikasi dan pembangunan”, “komunikasi dan perubahan sosial, “komunikasi dan partisipasi masyarakat, “komunikasi dan pendidikan masyarakat, ataupun “komunikasi dalam difusi inovasi”.

Sekalipun dengan topik-topik yang beraneka namun dalam esensinya, sesungguhnya semua kajian tersebut memperbincangkan hal yang sama, yakni bagaimanakah proses komunikasi (baik dalam arti yang seluas-luasnya, maupun yang tertentu) dapat berperan maksimal dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, umumnya dibahas pula, dimanakah sebenarnya tempat disiplin komunikasi dalam teori dan prakteknya dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat yang sedang membangun?.

Dalam Arti Luas dan Terbatas

Dari pengamatan terhadap perkembangannya sejak awal hingga sekarang, maka konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta tehnik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan

pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Pengertian yang Luas

Pembahasan komunikasi dan hubungannya dengan pembangunan dalam suatu skala yang luas menyentuh bidang-bidang spesialisasi lain seperti komunikasi politik, dan kebijakan komunikasi. Ulasan yang dibuat Tehranian (1997) misalnya, merupakan bagian dari tinjauan komunikasi politik dalam suatu masyarakat.

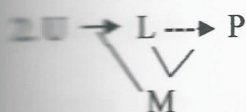
Ke dalam pengertian yang luas tadi, dapat digolongkan berbagai teori dan pendekatan yang berasal dari bermacam disiplin ilmu yang mengupas masalah inter-relasi komunikasi dengan pembangunan. Bahasan yang menonjol mengenai hal itu, telah dikemukakan antara lain oleh Schramm (1964), Lerner (1974), Pye (1963), Rogers (1969), Deutsch (1963), Pool (1963), Tehranian (1979), dan Dissayanake (1982). Pandangan-pandangan yang mereka ajukan pada dasarnya telah meletakkan dasar bagi suatu pendekatan yang bersifat global dan makro, tentang bagaimana menempatkan komunikasi dalam arti yang seluas-luasnya di tengah kegiatan besar yang bernama pembangunan, juga dalam arti yang menyeluruh.

Studi Lerner

Daniel Lerner melakukan studi yang kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul *The Passing of Traditional Society* pada tahun 1957. Karyanya ini dipandang penting karena termasuk studi yang pertama mengupas hubungan komunikasi dengan pembangunan. Lerner melakukan penelitiannya itu di enam negara kawasan negara timur tengah yaitu: Turki, Libanon, Mesir, Syiria, Yordania dan Iran. Di sana ia menganalisis hubungan antara tingkat urbanisasi dengan tingkat melek huruf, dengan penggunaan media massa, kemudian dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

Pada pokoknya, Lerner mengemukakan bahwa modernisasi suatu bangsa dimulai dari terjadinya urbanisasi. Seterusnya urbanisasi akan meningkatkan melek huruf, lalu meningkatkan penggunaan media, dan kemudian meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menurut Lerner, kehidupan di kota menuntut orang untuk mampu membaca dan menulis. Dengan kemampuan tersebut mereka akan menjadi pengguna media massa. Hal itu kelak akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang tercermin dalam partisipasi mereka di pemilihan umum. Garis besar teori Lerner tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. $U \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow P$



U = *Urbanization* (urbanisasi)

L = *Literacy* (melek huruf)

M = *Media Participation* (penggunaan media massa)

P = *Political Participation* (partisipasi politik)

Menurut Lerner, untuk bisa berubah menjadi modern, anggota masyarakat harus memiliki mobilitas baik dalam arti fisik, maupun psikis. Mobilitas fisik berarti pergerakan anggota masyarakat termasuk dalam arti perpindahan dari desa ke kota. Remodernisasi menyangkut suatu perubahan menyeluruh pada karakter atau watak yang mengarah atau menuju kepada mobilitas psikis.

Sedang mobilitas psikis berarti Bergeraknya seseorang dalam arti kejiwaan. Mobilitas fisik akan merubah kehidupan baik individu, maupun masyarakat. Dengan mobilitas psikis itu, seseorang dapat menempatkan dirinya pada kedudukan orang lain, atau yang dinamakan sebagai empati. Dengan kemampuan berempati maka seseorang mempunyai bayangan adanya kemungkinan untuk mengubah kehidupan ke keadaan yang lebih baik dari apa yang didapatkan saat ini. Itu berarti seorang individu, suatu masyarakat dan suatu bangsa dapat mengubah kehidupan mereka bila mereka mau berusaha mencapai hal itu.

Agar dapat berubah, seseorang harus berkepribadian yang mobil atau tidak terpeka pada satu sisi saja. Kepribadian yang mobil dalam masyarakat modern ditandai oleh empati –yaitu kemampuan seseorang untuk membayangkan dirinya berada di posisi orang lain. Berarti seorang individu dapat membayangkan dirinya sedang berada di situasi, tempat dan waktu yang asing.

Kemampuan bersama orang lain, kesanggupan menyesuaikan diri dan kesediaan untuk berinovasi –semua itu adalah empati- menurut Lerner, merupakan prasyarat untuk mengambil peran baru sekaligus penyesuaian pada situasi baru. Pembentukan pribadi yang empati pada masyarakat tradisional dibina melalui pengenalan komunikasi masa. Wawasan masyarakat tidak lagi terbatas pada hal-hal setempat saja. Media massa mendidik masyarakat untuk menerima berita-berita supra-lokal (yang lebih tinggi dan luas dari setempat). Dengan begitu kepekaan dapat tercipta sebagai permulaan dari mobilitas yang sesungguhnya (sosialisasi yang difasilitasi).

Menurut Lerner, sistem komunikasi merupakan indikasi sekaligus agen dari proses perubahan sosial. Ia melihat bahwa perubahan sistem komunikasi masyarakat telah berjalan satu arah yaitu dari sistem komunikasi oral (mulut ke mulut) ke media (yang menggunakan media). Sistem komunikasi oral, cocok untuk masyarakat tradisional, sedangkan sistem media sesuai untuk masyarakat modern.

Modernisasi, menurut Lerner, pertama-tama merupakan suatu proses komunikasi. Seperti beberapa ahli lain, ia juga melihat bahwa unsur-unsur tertentu

dari budaya nasional atau lokal merupakan penghambat yang harus dihapus untuk menuju masyarakat modern. Transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern berkaitan dengan tingkat perubahan sejumlah karakter individual yang berhubungan dengan modernisasi.

Media massa yang punya kemampuan dalam membina empati tadi, menjadi pengganda mobilitas individu dan masyarakat. Bersama dengan empati ditekankan juga pentingnya suatu rasionalitas yang harus tetap ditingkatkan. Rasionalitas juga menyangkut kecenderungan untuk memandang masa depan dan prospek pribadi dalam arti suatu hasil pencapaian, daripada sesuatu yang sekedar diwarisi. Jadi manusia modern tidak lagi ditandai oleh ketidakberdayaan pribadi –yaitu oleh perasaan seolah-olah anda tidak dapat berbuat sesuatu menyangkut suatu problem pribadi atau masyarakat yang berkaitan dengan ide bahwa anda tak dapat melawan nasib atau agama. Jadi kepribadian yang modern ditandai oleh suatu nilai-nilai psikososial yang kompleks. Di situ terdapat penekanan pada suatu kesiapan untuk pengalaman-pengalaman baru dan keterbukaan terhadap inovasi.

Lerner merumuskan empat variable kecenderungan modernisasi yang berlangsung secara global, yaitu:

1. Urbanisasi atau proporsi populasi di kota dengan penduduk lebih dari 50 ribu.
2. Literasi atau proporsi populasi yang dapat membaca satu bahasa.
3. Partisipasi yang terdiri dari ekonomi (ditandai melalui urbanisasi dan pendapatan per kapita) dan partisipasi politik (ditandai oleh pemberian suara di pemilu).

4. Konsumsi media (sirkulasi surat kabar harian, jumlah pesawat radio, dan jumlah kursi di bioskop).

Sebagai patokan, Lerner mengemukakan bahwa setelah suatu negara mencapai tingkat urbanisasi 10%, maka tingkat melek huruf akan sama-sama meningkat hingga mencapai 25%. Apabila suatu masyarakat telah mencapai tingkat urbanisasi 25%, maka korelasi tertinggi dari konsumsi media adalah dengan tingkat melek huruf.

Belakangan, teori Lerner ini pun mendapat kritikan. Berdasarkan pengalaman di banyak negara berkembang, ternyata arus urbanisasi tidak selalu menghasilkan peningkatan baca-tulis di kalangan anggota masyarakat yang pindah ke kota. Malah yang terjadi adalah mereka membentuk komunikasi sendiri di pinggir-pinggir kehidupan kota, lalu menjadi suatu kawasan kumuh. Juga tidak dilanjutkan dengan peningkatan konsumsi media, apalagi berpartisipasi politik.

Namun kurang lebih dari dua puluh tahun kemudian, dalam sebuah wawancara dengan Iranian Communication and Development Institute (ICDI) pada tahun 1997, Lerner memperbaiki beberapa hal dari teori modernisasi yang ia kemukakan sebelumnya, yaitu:

Pertama, urbanisasi tidak lagi sebagai langkah pertama. Gantinya adalah melek huruf dan pengenalan media, lalu bergerak menuju partisipasi.

Pertama, urbanisasi tidak lagi sebagai langkah pertama. Gantinya adalah melek huruf dan pengenalan media, lalu bergerak menuju partisipasi.

Kedua, indikator partisipasi politik bukan lagi hanya pemberian suara di pemilu, tapi sedang dicarikan indikator lain yang bersifat psikologis semacam "empati".

Ketiga, Lerner tidak lagi menyebut keseluruhan proses tersebut sebagai modernisasi, tapi menggantinya dengan perubahan.

Keempat, karena itu faktor yang dikemukakan sebelumnya (urbanisasi, melek huruf, pengenalan media dan partisipasi) tidak lagi disebut indikator kemodernan, tapi sebagai kecenderungan kepada perubahan (*propensity to change*) atau kesiapan orang untuk mencoba hal-hal yang baru. (Nasution, 2004: 105-112).

C. Peran Komunikasi Dalam Pembangunan

Keselarasan antara masyarakat dan pemerintah yang sedang menjalankan program pembangunan lebih mudah direalisasikan apabila terdapat kehadiran komunikasi pembangunan. Pembangunan yang sebenarnya memiliki tujuan mulia dapat dikemas ke dalam pesan-pesan komunikasi yang perlu dimengerti, dipahami, dan bahkan menjadi consensus meskipun harus melewati proses tarik menarik bahkan konflik saat dikomunikasikan dengan masyarakat.

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam

pembangunan. Rogers menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. (Marlia, 2008: 64).

Dikatakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses, yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriyah dan kepuasan bathiniyah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari masalah proses yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk merubah sikap, pendapat dan perilakunya. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen yakni komunikator pembangunan, bisa aparat pemerintah atau pun masyarakat, pesan pembangunan yang berisi ide-ide atau pun program-program pembangunan, dan komunikan pembangunan, yaitu masyarakat luas baik penduduk desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan. Schram dalam karyanya *Mass Media and National Development: The Role of Information in Developing Countries* merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional:

1. Menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan nasional

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan,
3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan (Nasution, 2001: 85).

Catatan tentang peranan komunikasi dalam pembangunan masih dapat diperpanjang, terutama karena semakin kompleksnya tuntutan pembangunan itu sendiri. Hedebro dalam *Communication and social change in Developing nation: a Critical view* membuat daftar tentang peran-peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, di antaranya:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru.
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.
5. Komunikasi dapat membuat orang untuk condong berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
6. Komunikasi dapat merubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional dengan membawakan pengetahuan kepada massa.
7. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.

8. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implelementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
9. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (*self-perpetuating*) (Nasution, 2001: 86-88).

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan konsep komunikasi pembangunan, maka dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta tehnik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 2001: 92).

Komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Fungsi komunikasi dalam pembangunan memegang peranan penting. Oleh karena itu, pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

Komunikasi telah menjadi bagian strategis yang perlu dicantumkan dalam setiap perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Ketidakpercayaan, penolakan, dan kebuntuan relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperbincangkan program pembangunan dapat difasilitasi keberadaan komunikasi sebagai aktivitas yang menjembatani interaksi di antara keduanya.

Pada akhirnya pembangunan yang membutuhkan partisipasi sosial melalui peran komunikasi melibatkan pelaku pembangunan dalam seluruh proses pembangunan mulai identifikasi kebutuhan serta analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu menempatkan berbagai pihak di tengah masyarakat sebagai sarana mengakomodasi aspirasi sekaligus mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari aktor pembangunan melalui komunikasi dialogis antara masyarakat dengan pengambil keputusan dalam proses pembangunan tersebut. (Syukur Kholil, 2008: 64-66).

BAB IV

KOMUNIKASI DAN MODERNISASI SERTA PENYULUHAN

DALAM PEMBANGUNAN

A. Konsep Modernisasi

Konsep modernisasi lahir sekitar tahun 1945 hingga pertengahan tahun 60-an dan ditandai beberapa momentum penting yaitu, pertama terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respon terhadap perang dunia kedua. Banyak pihak meyakini teori ini menjadi pintu masuk menuju perubahan. Kedua, terjadinya perang dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Unisoviet (USSR) yang berideologi sosialis dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Dominasi yang ditunjukkan oleh kedua negara tersebut bermuara pada ekspansi wilayah di negara-negara berkembang untuk menerapkan ideologi mereka. Sebuah kekuatan besar berhasil, negara-negara di dunia terpolarisasi ke dalam beberapa kubu dan kategori yang mengarah pada munculnya dikotomi negara. Akibatnya, negara-negara pada saat itu terpolarisasi ke dalam bentuk negara maju dan negara terbelakang (dunia ketiga), negara kaya, negara miskin, negara sosialis dan negara kapitalis, negara pusat dan negara pinggiran dan lain-lain yang berkembang saat itu seiring dengan perubahan dan kemajuan masyarakat bangsa. Dengan istilah lain, teori ini melihat masyarakat pada posisi dikotomi, yaitu modern dan tradisional. Menurut teori modernisasi, negara yang belum maju masih

tradisional, belum bisa lepas dari nilai-nilai ketradisionalannya yang belum modern sehingga tidak menopang pembangunan. (Sumadi Dilla, 2007:65-66).

Keberhasilan ilmuan Amerika meramu dan merumuskan kebijakan teoritis akhirnya mampu mempengaruhi dan membujuk negara-negara baru berkembang dengan teori modernisasinya. Semula teori ini hanya sebuah gagasan sosial namun lambat laun menjadi ideologi bagi negara-negara berkembang (yang baru merdeka, termasuk Indonesia). Sebagai contoh, beberapa ilmuan sosial dan ekonomi kita sekitar tahun 1980-an mengusung tema modernasi dalam tesisnya. Dari kalangan ilmu sosial (sosiologi) dikenal Sellu Sumardjan, sementara dari kalangan ekonomi dikenal Sumitro Djodjohadikusumo, Radius Prawiro dan lain-lain. Mereka disebut para pemikir kaum modernis. Kuatnya pengaruh propaganda teori ini membuat banyak negara memperlakukan teori sebagai mitos sosial yang tumbuh dan sulit diruntuhkan saat itu. Perkembangan teori modernisasi ini akibat dukungan dana dan politik yang luar biasa dari pemerintah dan organisasi swasta di Amerika serta negara liberal lainnya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, modernisasi dikenal sebagai suatu gerakan keilmuan antar disiplin ilmu sosial yang berfokus pada perubahan kajian sosial. Pengaruhnya yang begitu kuat pada saat itu membuat semangat modernisasi mengarah pada sebuah aliran pemikiran dan ideologi. Awalnya sentuhan teori modernisasi lebih pada aspek ekonomi dan politik, kemudian meluas ke wilayah keagamaan, juga ke wilayah organisasi non pemerintah. Saat itulah istilah

modernisasi menjadi ide, konsep pemikiran, pembahasan aktual, dan rujukan utama dunia ketiga dalam kerangka pembangunan negara dan bangsa. Dengan kata lain, modernisasi juga menjadi simbol imperialisme negara modern yang cenderung memaksakan konsep pembangunan negaranya terhadap negara lain (dunia ketiga).

Secara sosiologis, modernisasi sebagai alat melengkapi semua keluarga dan kelompok primer lainnya agar memiliki peran-peran khusus dengan munculnya kesadaran dan pentingnya asosiasi sekunder yang berfungsi majemuk. Secara ekonomis, modernisasi mengacu pada terjadinya peragaan aktivitas, di mana lapangan pekerjaan tradisional berkembang menjadi sektor yang lebih kompleks dan luas, mengandalkan keterampilan kerja secara berarti, serta komposisi modal dan tenaga kerja yang lebih rasional. Secara demokratis, modernisasi mengaju pada adanya perubahan pola hidup yang ditandai dengan meningkatnya harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, dan mobilitas penduduk, di mana terjadinya pertumbuhan pesat penduduk perkotaan yang tak sebanding dengan perkembangan penduduk pedesaan.

Secara politik, modernisasi melibatkan tiga aspek. Pertama, melibatkan nasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan, oleh kekuasaan nasional yang bersifat sekuler. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah produk kerja manusia bukan hakikat alam atau Tuhan sehingga tertib sosial harus mengandung sumber daya manusia. Di sini diperlukan juga integrasi nasional serta sentralisasi dan akumulasi kekuasaan

lembaga pembuat hukum nasional yang berwibawa tinggi. Kedua, melibatkan diferensiasi fungsi politik dan pengembangan fungsi khusus. Dalam hal ini wilayah kewenangan hukum, militer dan administratif terpisah dari dunia politik,. Ketiga, institusi sosial dan politik menjadi kekuatan penyeimbang dalam ranah demokrasi sebagai *agen of control* dalam kekuasaan negara.

B. Pembangunan Sebagai Proses Modernisasi

Teori modernisasi mengusung semangat pembangunan mengubah masyarakat dari era tradisonal menuju masyarakat modern. Mulai dari nilai, ekonomi, budaya, sosial dan politik yang dipercaya masyarakat negara-negara berkembang. Tema modernisasi selalu menjadi ukuran kemajuan masyarakat. Di sini manusia dianggap sebagai faktor produksi, sehingga terjadi penghisapan tenaga kerja manusia oleh manusia. Jika sebelumnya manusia menjadi faktor kunci dalam usaha produksi, dalam pandangan teori modernisasi anggapan ini mulai bergeser, mereka telah digantikan mesin-mesin produksi. Model ini diterima sebagai suatu kebijaksanaan dan didasarkan pada serangkaian asumsi bahwa:

- Pembangunan identik dengan pertumbuhan.
- Pertumbuhan dapat dicapai dengan penerapan ilmu-ilmu dan teknologi Barat ke problem produksi.

- Semua masyarakat melalui suatu rangkaian pertumbuhan dicerminkan oleh kemampuan mereka berinvestasi dan pemanfaatan perangkat ilmu dan teknologi.
- Sementara pertumbuhan berlangsung, institusi sosial dan politik masyarakat tradisional akan digantikan oleh bentuk-bentuk modern dalam kenyataan sosial, hal ini berarti penggantian pola-pola kewajiban dan identifikasi yang lebih komunal dengan model motivasi yang lebih individualistik.
- Bentuk-bentuk kekuasaan politik tradisional dan feodal akan digantikan oleh bentuk-bentuk yang lebih demokratis.
- Konvergensi masyarakat-masyarakat menuju model modernitas ini akan menghasilkan suatu tatanan global yang tidak begitu mendukung, komplik-kompik ideologis.

Negara-negara yang baru merdeka tadi menurut para ahli ekonomi Barat harus dibebaskan dari lingkaran setan kemiskinan yang tidak mempunyai industri karena miskin, dan miskin karena tidak mempunyai industri. Untuk keluar dari lingkaran setan itu negara-negara ini memerlukan uang dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan industrialisasi.

Paradigma pembangunan yang berlaku pada masa itu, yang juga dikenal sebagai paradigma modernisasi, memandang pembangunan sebagai sesuatu perspektif yang tunggal arah (*unilinear*) dan bersifat evolusioner. Para ahli pembangunan ketika itu merumuskan keadaan keterbelakangan dalam bentuk

perbedaan-perbedaan yang dapat dilihat (*observable*), dan kuantitatif antara negara-negara miskin dan kaya di satu pihak, dan antara sektor tradisional dengan sektor modern di negara-negara miskin itu sendiri. Jarak yang terdapat antara negara kaya dan negara miskin itu hendak dijabatani melalui pembangunan yang diartikan proses peniruan (*imitative process*). Dalam tahapan-tahapan yang begitu rupa sehingga secara bertingkat (*gradual*) pula sektor-sektor yang ada maupun negaranya sendiri pada masyarakat tradisional akan memiliki kualitas yang modern.

Dalam prakteknya ternyata modernisasi amat berbentuk westernisasi dalam arti negara-negara baru itu harus mengikuti dan menyalin sepenuhnya model-model dari Barat. Padahal seperti kata Schram (1979) negara-negara berkembang haruslah menyadari betapa *histori specific*nya model pembangunan Barat itu sebenarnya. Model tersebut memang sejak asalnya ditempa untuk suatu situasi yang amat berbeda dengan negara-negara berkembang, misalnya Indonesia, India, Ekuador dan lain-lain.

Menurut Rogers dan Svenning (1969), modernisasi pada tingkat individual berkaitan dengan pembangunan pada tingkat masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan individual dari gaya hidup tradisional ke suatu cara hidup yang lebih kompleks, secara teknologis lebih cepat dan berubah cepat. Selama ini menurut mereka terjadi kesalahpahaman (*miskonsepsi*) tentang modernisasi, yaitu:

1. Modernisasi sering disetarakan dengan Eropanisasi atau Westernisasi.

Rogers mengartikan modernisasi tidak sinonim dengan pengertian-pengertian di atas. Mencap proses perubahan sosial sebagai Eropanisasi

atau Westernisasi mengandung arti bahwa sumber atau pendorong perubahan harus datang dari Eropa atau dari bangsa-bangsa Barat. Selanjutnya juga mengandung arti bahwa negara-negara yang mengadopsi ide-ide yang berasal dari Barat menjadi seperti Barat hingga tingkat tertentu. Pandangan seperti itu terlalu membatasi dan dalam banyak hal tidak akurat. Modernisasi menurut Rogers merupakan sintesis dari cara-cara lama dan baru dan dengan begitu bisa berlainan dalam lingkungan yang berbeda. Unsur-unsur barunya tidak harus datang dari Eropa atau Barat. Adopsi inovasi yang dikembangkan di luar tidak menjadikan negara penerima menjadi replika dari negara sumber karena sebagian besar inovasi menuntut adaptasi yang lumayan untuk memenuhi kondisi-kondisi yang berbeda di negara penerima.

2. Seringkali terkandung arti bahwa seluruh modernisasi adalah baik. Definisi Rogers sama sekali tidak bermaksud melakukan value judgement. Modernisasi membawa perubahan yang amat mungkin menghasilkan, bukan hanya manfaat tapi juga konflik, kesakitan dan keuntungan relatif. Black (1966) mengingatkan bahwa modernisasi harus dipikirkan sebagai sesuatu proses yang secara simultan bersifat kreatif dan destruktif, memberikan kesempatan-kesempatan dan prospek baru dengan suatu harga yang tinggi yang terkadang harus dibayar dalam bentuk penderitaan.

3. Proses modernisasi tidak berdimensi tunggal (unidimensional) sehingga tidak dapat diukur hanya dengan satu kriteria atau indeks saja. Modernisasi harus dipandang sebagai suatu proses yang menyangkut interaksi banyak faktor sehingga harus lebih dari satu aspek perilaku individual yang diukur guna menentukan statusnya dalam kontinum modernisasi. Variabel-variabel seperti tingkat kehidupan, aspirasi, melek huruf dan pendidikan, partisipasi politik, kekosmopolitanan dan komunikasi semuanya merupakan faktor yang menentukan modernisasi (Nasution, 2004: 37-38).

C. Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi

Dalam ilmu komunikasi pembangunan, penyuluhan dinamakan juga dengan difusi. Model difusi akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai pendekatan dalam komunikasi pembangunan, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Di antara pemikiran-pemikiran para pakar adalah yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers yang menulis buku yang berjudul "*Diffusin of Innovations*" dan "*Communication Technology, the New Media in Society*" serta bersama F. Floyd Shoemaker menulis buku "*Communication of Innovations*".

Dari buku-buku Rogers tersebut dapat disimak pengertian difusi, unsur-unsur difusi, ciri-ciri inovasi, langkah-langkah dalam proses inovasi keputusan dan lain sebagainya.

Rogers mendefenisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*). Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi dan saling pertukaran informasi tersebut untuk mencapai pengertian bersama. Di dalam isi pesan itu terdapat ketertarikan (*newness*) yang memberikan kepada difusi ciri khusus yang menyangkut ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian adalah suatu derajat di mana sejumlah alternatif dirasakannya berkaitan dengan suatu peristiwa beserta kemungkinan-kemungkinan pada alternatif tersebut. Derajat ketidakpastian oleh seseorang akan dapat dikurangi dengan jalan memperoleh informasi.

Unsur-unsur utama difusi adalah: (1) inovasi, (2) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu, (3) dalam jangka waktu tertentu, (4) di antara para anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide, karya, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang.

Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkatan adopsi. Lima ciri inovasi menurut Rogers adalah sebagai berikut:

- a. *relative advantage* (keuntungan relative)
- b. *compatibility* (kesesuaian)
- c. *complexity* (kerumitan)
- d. *trialability* (kemungkinan dicoba)
- e. *observability* (kemungkinan diamati)

Relative advantage adalah suatu derajat di mana inovasi dirasakan lebih baik daripada ide lain yang menggantikannya. Derajat keuntungan relatif tersebut dapat diukur secara ekonomis, tetapi faktor prestasi sosial, kenyamanan dan kepuasan juga merupakan unsur penting.

Compatibility adalah suatu derajat di mana inovasi dirasakan ajeg atau konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman dan kebutuhan mereka yang melakukan adopsi.

Complexity adalah mutu derajat di mana inovasi dirasakan sukar untuk dimengerti dan dipergunakan.

Trialbility adalah mutu derajat di mana inovasi dapat dieksperimentasikan pada landasan yang terbatas.

Observability adalah suatu derajat di mana inovasi dapat disaksikan oleh orang lain.

Mengenai saluran komunikasi sebagai sarana untuk menyebarkan inovasi, Rogers menyatakan bahwa media massa lebih efektif untuk menciptakan pengetahuan tentang inovasi, sedangkan saluran antarpribadi lebih efektif dalam pembentukan dan percobaan sikap terhadap ide baru, jadi dalam upaya mempengaruhi keputusan untuk melakukan adopsi atau menolak ide baru.

Aspek lain dalam kegiatan difusi adalah apa yang dalam komunikasi dikenal sebagai *heterophily* dan *homophily*.

Mengenai waktu sebagai salah satu unsur utama dari difusi ide baru itu meliputi tiga hal, yakni sebagai berikut:

1. *innovation-decision process* (proses inovasi keputusan)
2. *innovativeness* (keinovatifan)
3. *innovation' rate of adoption* (tingkat inovasi dari adopsi)

Innovation-decision process adalah proses mental di mana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke putusan menerima atau menolak, ke pelaksanaan idea baru, dan kepeneguhan keputusan itu.

Ada lima langkah yang dikonseptualisasikan dalam proses ini, yakni:

1. *knowledge* (pengetahuan)
2. *persuasion* (persuasi)
3. *decision* (keputusan)
4. *implementation* (pelaksanaan)

5. *confirmation* (peneguhan)

Dalam prose inovasi keputusan ini seseorang mencari informasi dalam beberapa langkah untuk mengurangi ketidakpastian mengenai inovasi. Pada langkah pengetahuan seseorang menerima informasi yang melekat pada inovasi teknologis; dia ingin mengetahui inovasi apa itu dan bagaimana kerjanya. Tetapi pada langkah persuasi dan keputusan, seseorang mencari informasi tentang penilaian inovasi untuk mengurangi ketidakpastian mengenai konsekuensi yang diharapkan dari inovasi itu. Langkah keputusan membawanya ke penerimaan (adopsi), keputusan untuk memanfaatkan inovasi itu sepenuhnya, atau ke penolakan, keputusan untuk menolak inovasi tersebut.

Innovativeness adalah derajat di mana seseorang relatif lebih dini dalam mengadopsi ide-ide baru ketimbang anggota-anggota lain dalam suatu sistem sosial. Pengadopsi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. *innovators* (innovator)
2. *early adopters* (pengadopsi dini)
3. *early majority* (mayoritas dini)
4. *late majority* (mayoritas terlambat)
5. *laggard* (orang belakangan)

Rate of adoption adalah kecepatan relative di mana suatu inovasi diadopsi oleh anggota-anggota suatu sistem sosial.

Rate of adoption atau tingkat adopsi biasanya diukur dengan waktu yang diperlukan untuk persentase tertentu dari para anggota sistem untuk mengadopsi suatu inovasi. Yang dimaksudkan sistem sosial adalah tatanan kesatuan yang menghubungkan satu sama lain dalam upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Onong Uchjana, 1993: 283-287).

D. Tugas dan Peran Agen Perubahan

Usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Orang-orang itu dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dikenal dengan sebutan agen perubahan (*change agents*).

Siapakah sebenarnya mereka itu?. Apakah motivasi yang menyebabkan mereka bersedia dan tertarik untuk mengemban tugas tersebut?. Kompetensi apa saja yang dimiliki orang-orang tersebut sehingga mereka berhasil menjalankan tugasnya?. Pertanyaan ini akan dijawab melalui beberapa kajian yang menjelaskan masalah agen perubahan dan tugas-tugasnya.

Kualifikasi dasar agen perubahan menurut Duncan dan Zaltman (19) merupakan tiga yang utama di antara sekian banyak kompetensi yang mereka miliki, yaitu:

1. Kualifikasi teknis, yakni kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan.

2. Kemampuan administrative, yaitu persyaratan administrative yang paling dasar dan elementer, yakni kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif menjelimet (*detailed*).
3. Hubungan antarpribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empathy, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagi akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri.

Suatu usaha perubahan sosial yang berencana tentu ada yang memprakarsainya. Prakarsa itu dimulai sejak menyusun rencana, hingga memelopori pelaksanaannya. Bila kita lihat dalam suatu masyarakat yang melaksanakan pembangunan sebagai suatu perubahan sosial yang berencana, maka lembaga-lembaga perubahan (*change agencies*) tersebut adalah semua pihak yang melaksanakan pembangunan itu sendiri. Ke dalamnya termasuk pemerintah secara keseluruhan, berikut departemen-departemen, lembaga-lembaga masyarakat, termasuk lembaga perekonomian beserta segala kelengkapannya.

Orang-orang yang melaksanakan tugasnya mewujudkan usaha perubahan sosial tersebut dinamakan agen perubahan, yang menurut Rogers dan Shoemaker (1971), merupakan petugas professional yang mempengaruhi putusan inovasi klien menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan social

adalah termasuk agen-agen perubahan. Dalam rumusan Havelock (1973), agen perubahan adalah seseorang yang membantu terlaksananya perubahan social atau suatu inovasi yang berencana. Dalam kenyataan sehari-hari, maka sejak mereka yang bekerja sebagai perencana pembangunan, hingga para petugas lapangan pertanian, pamong, guru, penyuluh, dan lainnya adalah agen-agen perubahan.

Agen-agen perubahan itu, menurut Rogers dan Shoemaker, berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antardua (atau lebih) sistem sosial. Yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan tadi dengan sistem sosial yang menjadi klien dalam usaha perubahan tersebut. Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan.

1. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.
2. Sebagai pemberi pemecahan sosial.
3. Sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta member petunjuk mengenai bagaimana:
 - a. mengenali dan merumuskan kebutuhan
 - b. mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan
 - c. mendapatkan sumber-sumber yang relevan
 - d. memilih atau menciptakan pemecahan masalah
 - e. menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah

4. Sebagai penghubung (*linker*) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Inti dari peranan agen perubahan dalam proses pembangunan masyarakat, menurut O'Gorman (1978) adalah:

1. *The "ought"*, yaitu mengidentifikasi tujuan, isu, dan permasalahan.
2. *The "can be"*, yaitu melakukan identifikasi dan pemanfaatan dari:
 - sumber-sumber
 - kepemimpinan
 - organisasi
3. *The "shall be"*, yakni dimensi tindakan atau kegiatan di mana prioritas ditegakkan dan ditetapkan, rencana dan pelaksanaan, serta evaluasi dilakukan menurut urutan yang teratur agar alternatif yang telah dipilih dapat membawa hasil yang diharapkan.

Tugas-Tugas Agen Perubahan

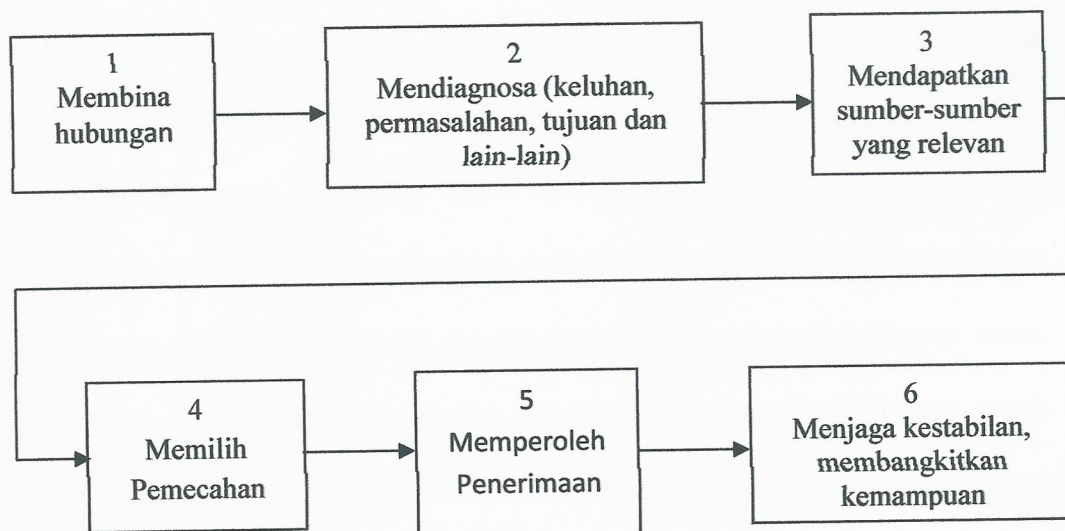
Setidak-tidaknya ada tujuh tugas utama agen perubahan dalam melaksanakan difusi inovasi (Rogers dan Shoemaker, 1971) yaitu:

1. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan.
2. Membina suatu hubungan dalam rangka perubahan (*change relationship*).
3. Mendiagnosa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien.
5. Menerjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan yang nyata.
6. Menjaga kestabilan perubahan dan mencegah terjadinya *dropout*.
7. Mencapai suatu terminal hubungan.

Langkah-langkah pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:

Pentahapan Langkah Agen Perubahan



Pertama-tama dari seorang agen perubahan diharapkan suatu peran pemrakarsa, pengambil inisiatif, dari perubahan social di tempat ia akan mendifusikan inovasi. Mula-mula kegiatannya adalah menumbuhkan keinginan di kalangan kliennya untuk melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Perubahan

yang dimaksud tentu saja suatu perubahan dari keadaan yang ada sekarang menuju ke situasi yang lebih baik.

Setelah keinginan itu tumbuh, maka agen perubahan menjalin hubungan baik dengan kliennya. Hubungan yang dimaksud adalah suatu kontak yang mengandung saling percaya, kejujuran, dan empati. Sebab untuk menerima suatu inovasi, pertama-tama klien harus dapat menerima si agen perubahan itu sendiri terlebih dahulu.

Langkah berikutnya adalah melakukan diagnosa terhadap kebutuhan masyarakat yang hendak dibantunya. Diagnosa ini harus benar-benar bertitik tolak dari pandangan masyarakat tersebut, dan bukan cuma dari kacamata si agen. Untuk itu dituntut kemampuan empati, yaitu menempatkan diri pada kedudukan masyarakat yang akan dibantu. Sesudah melakukan diagnosa, kemudian agen perubahan harus menciptakan hasrat yang serius untuk berubah di kalangan klien. Arti perubahan di sini bukan sekedar “berubah”, namun benar-benar untuk kepentingan klien yang bersangkutan. Hasrat yang serius ini selanjutnya diterjemahkan menjadi tindakan ataupun perbuatan yang nyata. Agen perubahan mempengaruhi perilaku kliennya (membuat mereka melakukan atau bertindak) menurut rekomendasi-rekomendasi yang diajukannya setelah menganalisa kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. (Nasution, 2004: 127, 128, 129, 133, 134).

BAB V

PERAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

A. Fungsi Media Massa Dalam Masyarakat

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing. *Gatekeeper* adalah penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah yang menyeleksi setiap informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan. Bahkan mereka memiliki kewenangan untuk memperluas, membatasi informasi yang akan disiarkan tersebut. Seperti, wartawan, desk surat kabar, editor dan sebagainya, bahkan penerima telepon di sebuah institusi media massa memiliki kesempatan untuk menjadi *gatekeeper* ini.

Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa. Sehubungan dengan itu, konsep khalayak dapat dijelaskan lebih terperinci pada konsep massa. Sedangkan umpan balik dalam komunikasi massa pada umumnya bersifat tertunda sedangkan umpan balik pada komunikasi tatap

muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin majunya media teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat tradisional. Saat ini media massa juga telah melakukan berbagai komunikasi interaktif antara komunikator dan publik, dengan demikian maka sifat umpan balik yang tertunda ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan teknologi telepon dan internet serta berbagai teknologi media yang mengikutinya. (Burhan Bungin, 2007: 72, 73).

Begitu pula dengan fungsi komunikasi media massa, sebagai aktivitas sosial masyarakat, komunikasi media massa juga mengalami hal-hal yang serupa. Seperti, pemberitaan bahaya Tsunami terhadap kehidupan masyarakat pantai. Di satu sisi pemberitaan tersebut adalah informasi mengenai bagaimana masyarakat pantai dapat menghindari bahaya Tsunami ketika bencana itu datang, tapi pemberitaan itu juga sekaligus menciptakan ketakutan dan kecemasan yang amat sangat bagi masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Bahkan pemberitaan itu juga berdampak buruk bagi orang-orang pegunungan yang akan merencanakan pindah ke daerah pesisir.

a. Fungsi Pengawasan

Media massa merupakan sebuah medium di mana dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Fungsi pengawasan ini bisa berupa peringatan dan control social maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan control social dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diinginkan. Seperti, pemberitahuan bahaya narkoba bagi

kehidupan manusia yang dilakukan melalui media massa dan ditujukan kepada masyarakat, maka fungsinya untuk kegiatan preventif agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengaruh narkoba. Sedangkan fungsi persuasif sebagai upaya member reward dan punishment kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dilakukannya. Media massa dapat memberikan reward kepada masyarakat yang bermanfaat dan fungsional bagi anggota masyarakat lainnya, namun sebagiannya akan memberikan punishment apabila aktivitasnya tidak bermanfaat bahkan merugikan fungsi-fungsi sosial lainnya di masyarakat.

b. Fungsi *Social Learning*

Fungsi utama dari komunikasi melalui media massa adalah melakukan guiding dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat di mana komunikasi itu berlangsung. Komunikasi dimaksudkan agar proses pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien dan menyebar secara bersamaan di masyarakat secara luas. Fungsi komunikasi ini merupakan sebuah andil yang dilakukan untuk menutupi kelemahan fungsi-fungsi paedagogi yang dilaksanakan melalui komunikasi tatap muka, di mana karena sifatnya, maka fungsi paedagogi hanya dapat berlangsung secara eksklusif antara individu tertentu saja.

c. Fungsi Penyampaian Informasi

Komunikasi yang mengandalkan media massa, memiliki fungsi utama, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Komunikasi



memungkinkan informasi dari institusi publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu cepat sehingga informasi informatif tercapai dalam waktu cepat dan singkat.

d. Fungsi Transformasi Budaya

Fungsi informatif adalah fungsi-fungsi yang bersifat statis, namun fungsi-fungsi lain yang lebih dinamis adalah fungsi transformasi budaya. Komunikasi sebagaimana sifat-sifat budaya massa, maka yang terpenting adalah komunikasi menjadi proses transformasi budaya yang dilakukan bersama-sama oleh semua komponen komunikasi, terutama yang didukung oleh media massa.

Fungsi transformasi budaya ini menjadi sangat penting dan terkait dengan fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi sosial learning, akan tetapi fungsi transformasi budaya lebih kepada tugasnya yang besar sebagai bagian dari budaya global. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan-perubahan budaya yang disebabkan karena perkembangan telematika menjadi perhatian utama semua masyarakat di dunia, karena selain dapat dimanfaatkan untuk pendidikan juga dapat dipergunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti politik, perdagangan, agama, hukum, militer, dan sebagainya. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam proses ini di mana hampir semua perkembangan telematika mengikutsertakan proses-proses komunikasi terutama dalam proses transformasi budaya.

e. Hiburan

Fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa seiring dengan fungsi-fungsi lain, komunikasi juga digunakan sebagai medium hiburan, terutama karena komunikasi menggunakan media massa, jadi fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga merupakan bagian dari fungsi komunikasi.

Transformasi budaya yang dilakukan oleh komunikasi mengikutsertakan fungsi hiburan ini sebagai bagian penting dalam fungsi komunikasi. Hiburan tidak terlepas dari fungsi media massa itu sendiri dan juga tidak terlepas dari tujuan transformasi budaya. Dengan demikian, maka fungsi hiburan dari komunikasi saling mendukung fungsi-fungsi lainnya dalam proses komunikasi. (Burhan Bungin, 2007: 79-81).

B. Penggunaan Media/Saluran Untuk Komunikasi Pembangunan

Perangkat media komunikasi pada abad 21 akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat dalam berbagai cara yang dramatis. Pertama, saluran komunikasi dalam hubungan dengan teknik-teknik robotic, kecerdasan artificial, dan teknik otomasi lainnya akan mengubah pola lowongan kerja secara dramatis, menurunkan jumlah orang yang bekerja di bidang-bidang tertentu seperti pertanian, pertambangan, dan pabrik, dan di abad 21, juga sekaligus industri jasa. Perangkat baru komunikasi ini juga akan melayani meningkatnya program-program hiburan, cultural, dan olahraga bagi semua penduduk dunia.

Sistem komunikasi masa depan akan mempengaruhi di mana kita hidup, bagaimana kita bekerja, apa yang kita lihat, jenis individu yang kita hubungi, bagaimana anak-anak kita didik, bagaimana orang dilatih untuk pekerjaan yang baru, dan sebagainya.

Kemajuan teknologi membawa serta pula sejumlah dampak negatif yang cukup membuat para pengamat untuk merasa kuatir bahwa bila hal itu tidak dicegah ataupun diperkecil, akan menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan. Identifikasi yang dibuat oleh Parker misalnya, memeperlihatkan beberapa dampak teknologi media komunikasi yang antara lain adalah:

1. Terjadinya monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan informasi.
2. Tidak meratanya distribusi informasi.
3. Kurangnya isi pesan yang bersifat edukatif.
4. Terjadinya polusi informasi.
5. Terjadinya invasi terhadap privasi.
6. Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta.

Teknologi komunikasi sudah jelas akan mempengaruhi struktur dasar dan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat, karena hal itu ikut menentukan siapa yang dapat berkomunikasi dengan siapa, dan siapa yang dapat memperoleh sesuatu informasi tentang apa. Perkembangan tersebut memungkinkan timbulnya

monopoli dalam pengelolaan dan penyediaan, serta pemanfaatan teknologi media komunikasi itu sendiri.

Mengingat besarnya modal yang dibutuhkan untuk pengusaha dan pemilikan sarana teknologi, maka besar sekali kemungkinan bahwa hanya mereka yang kuat kemampuan finansialnya yang dapat bergerak di bidang ini. Andaikata bidang ini dimonopoli oleh kaum swasta yang komersial, dapat dipastikan bahwa orientasi operasinya juga tentulah untuk mencari keuntungan yang optimal. Konsekuensi dari orientasi seperti itu, maka isi informasi yang terutama disediakan dan ditawarkan tentunya yang melayani kebutuhan dan permintaan kalangan pemakai yang secara komersial akan menguntungkan. Di luar itu, baik isi informasi maupun kalangan pemakai lainnya akan kurang mendapat perhatian dan pelayanan, setidaknya pemakai lainnya akan kurang mendapat perhatian dan pelayanan, setidaknya akan menempati urutan prioritas yang lebih belakangan dibanding pemakai yang mendatangkan keuntungan tadi.

Para pengguna jasa teknologi media komunikasi masih dapat memilih berdasarkan apa yang mereka perlukan, namun harus diingat bahwa pada dasarnya pilihan yang masih mungkin dilakukan itu adalah terbatas pada apa yang disediakan oleh si pengusaha. Karena itu diperlukan upaya mencegah terjadinya monopoli penyediaan dan pengelolaan teknologi media komunikasi ini, agar kemungkinan jelek seperti diperkirakan itu tidak terjadi.

Faktor biaya menyebabkan kecenderungan bahwa yang akan mengelola teknologi media komunikasi adalah terutama mereka yang bermodal kuat. Apabila kecenderungan ini tidak diimbangi dengan tindakan langsung oleh pemerintah, misalnya dengan menyediakan sarana teknologi baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat luas, maka kaum pengusaha yang akan mendominasi bidang ini.

Apabila pengusaha teknologi media komunikasi sepenuhnya ditangani oleh kaum swasta, sudah barang tentu pertimbangan utama mereka sebagaimana layaknya kaum bisnis adalah mengejar keuntungan finansial lebih dulu, baru menyusul pertimbangan lainnya, kalau pun ada. Akibat langsung dari kecenderungan ini tentunya, hanya mereka yang kuat menanggung ongkos dan harga yang dikenakan oleh si pengusaha yang dapat menikmati pelayanan teknologi media komunikasi dimaksud. Ironisnya, justru kaum mampu tersebut justru merupakan kalangan yang telah memiliki sarana komunikasi yang jauh lebih lengkap dibanding dengan rata-rata kebanyakan anggota masyarakat. Sedangkan lapisan masyarakat yang tidak mampu menanggung bayaran yang dikenakan, hanya akan bergantung sepenuhnya kepada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Akibat lanjutannya, mereka yang telah 'berkecukupan informasi' akan bertambah melimpah informasinya, sedang khalayak lain yang selama ini pun telah berada dalam kondisi 'kekurangan informasi' akan semakin tertinggal dalam perolehan informasi. Secara ekstrim, keadaan seperti ini hanya akan membentangkan

suatu jurang baru, antara golongan kaya informasi dengan lapisan lain yang jumlahnya berlipat ganda, yang miskin informasi. Pada gilirannya, jarak yang sama akan membetang di antara negara-negara yang kaya informasi dengan negara yang miskin informasi.

Erat sekali kaitannya dengan soal pertimbangan komersial yang dikemukakan di atas tadi, akan terjadi pula kecenderungan untuk hanya menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan isi informasi yang secara komersial akan laris. Bentuk utama informasi jenis ini adalah hiburan dan iklan. Padahal bila pasar informasi hanya dipenuhi oleh pesan-pesan hiburan dan promosi, dengan sendirinya kehidupan masyarakat sehari-hari akan penuh dengan jejalan hal-hal semacam itu.

Polusi informasi cenderung timbul bila kompetisi yang hebat terjadi dalam merebut perhatian khalayak, serta jika akan mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegahnya. Gabor mengemukakan bahwa polusi informasi tercermin dari penuhnya media massa dengan penyiaran informasi tentang skandal, kekerasan, dan pornografi. Memang lumrah sekali bila kecenderungan komersial teknologi media komunikasi akan menimbulkan persaingan yang tajam dan kasar di antara pengusaha informasi.

Dalam keadaan seperti itu, maka aturan yang berlaku secara ekonomi adalah, siapa yang berhasil memancing dan memuaskan selera pembeli, dialah yang akan mereguk keuntungan. Yang menjadi masalah, justru informasi yang menimbulkan

polusi yang merupakan dagangan yang laris dan cepat menghasilkan laba bagi yang menyediakannya.

Masalah privasi merupakan sesuatu yang amat penting terutama di negara-negara Barat. Dengan berkembangnya teknologi media komunikasi, maka pesat pula pertumbuhan berbagai perusahaan pengumpulan, pelayanan, dan pendistribusian segala jenis data termasuk yang bersifat pribadi. Dalam aktivitas perusahaan informasi tersebut kemudian terkumpul berbagai macam data mengenai segala aspek kehidupan anggota masyarakat. Data yang dimaksud, bisa saja diperdagangkan tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan yang bersangkutan.

Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membuka peluang bagi terjadinya intervensi ke dalam kehidupan pribadi seseorang, yang menyebabkan terjaminnya lagi privasi. Itulah sebabnya timbul berbagai reaksi yang menuntut dilindunginya privasi setiap anggota masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan informasi yang mungkin timbul dari kemajuan teknologi media komunikasi.

Kemampuan sarana teknologi media komunikasi untuk menyimpan, memperbanyak, menampilkan kembali informasi apa saja yang berhasil diperoleh, juga menimbulkan masalah yang berkaitan dengan hak cipta. Kemajuan satelit komunikasi misalnya, telah memungkinkan dilampauinya batas-batas wilayah suatu negara atau pemerintahan. Perkembangan ini menimbulkan masalah dalam hal perlindungan terhadap hak cipta atas karya-karya kreatif yang tadinya dijamin undang-undang. Perlindungan tersebut menjadi semakin sukar terutama disebabkan

semakin canggihnya kemampuan teknologi media komunikasi yang muncul dewasa ini. (Batubara, 2008: 19-22)

Adapun media yang dipergunakan sebagai saluran untuk komunikasi pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Media komunikasi tradisional

Media komunikasi tradisional juga dikenal sebagai media rakyat. Dalam pengertian yang lebih sempit, media ini sering disebut sebagai kesenian rakyat. Dalam hubungan ini menurut Coseteng dan Nemenzo (dalam Ferenandez, 1982) mendefinisikan media tradisional sebagai “bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan, dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh dan atau untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik.

Sejalan dengan defenisi ini, maka media rakyat tampil dalam bentuk nyayian rakyat, tarian rakyat, musik instrumental rakyat, pidato rakyat yaitu semua kesenian rakyat apakah berupa produk sastra, visual, ataupun pertunjukan yang diteruskan dari generasi ke generasi (Clavel dalam Fernandez, 1982).

Di Indonesia, media tradisional yang masih memikat cukup banyak orang ialah pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat ini adalah aktivitas kesenian rakyat yang bersifat hiburan. Ia menggunakan gerak dan suara sebagai sumber ekspresinya dan dipertunjukkan kepada khalayak penonton.

Sifat kerakyatan bentuk kesenian ini menunjukkan bahwa ia berakar pada kebudayaan rakyat yang hidup di lingkungannya. Pertunjukan-pertunjukan semacam ini biasanya sangat komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Dalam penyajiannya, pertunjukan ini biasanya diiringi oleh musik daerah setempat (Direktorat Penerangan Rakyat, 1979). (Amri Jahi, 1988: 101)

Media-media yang termasuk ke dalam media komunikasi tradisional adalah wayang, syair, bedug, dogeng dan lain-lain.

b. Media komunikasi cetak dan elektronik

Adapun yang termasuk ke dalam media komunikasi cetak dan elektronik adalah buku, majalah, surat kabar, radio, film, televisi, internet dan lain-lain. (Batubara, 2008: 52).

C. Membuat Isi Atau Pesan Komunikasi Pembangunan

Penulisan berita atau isi komunikasi pembangunan atau yang dinamakan juga dengan jurnalistik pembangunan harus dengan cara yang khusus. Sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat dan negara yang berkembang ialah mencari cara-cara yang tertentu dan sesuai dengan keadaan. Seperti kita ketahui, masyarakat di negara yang sedang berkembang terdiri dari bermacam-macam situasi, biasanya ada tiga macam kondisi.

1. Masyarakat yang sudah maju (terorganisir) sudah mengecap pendidikan.

2. Masyarakat yang masih tradisional (masih selalu dipengaruhi oleh adat istiadat, tertutup, statis, kurang mampu dan bahkan tidak mengecap pendidikan menengah).
3. Masyarakat transisi, ialah masyarakat yang terletak di antara modern dan tradisional.

Jurnalistik pembangunan dalam laporannya melalui media massa harus mengusakan suatu cara agar kehadirannya bisa lebih banyak lagi dimengerti oleh masyarakat yang dalam keadaan demikian itu.

Penulisan hendaknya mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Dalam hal ini memperhatikan:

1. Menghindari kalimat yang mengandung kerancuan (tidak jelas)
2. Kata-kata asing yang tidak perlu jangan dipergunakan
3. Kalimat pendek dan aktif lebih baik

Hingga masyarakat luas, baik yang sudah berpendidikan apalagi yang masih minim pendidikannya dapat dengan mudah mengerti.

Untuk itulah dalam Jurnalistik Pembangunan harus menulis dengan apa yang dikatakan komprehensif. Menulis laporan komprehensif yakni dalam penulisan lebih luas dan mendalam. Fakta, latar belakang dan apa yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang harus ada hal yang jelas. Dalam hal penulisan berita pembangunan sebaiknya dibagi dengan mengadakan seleksi, melihat pedoman yang harus diperhatikan dan juga teknik penulisannya.

Pada Jurnalistik Pembangunan laporan komprehensiflah yang diterapkan sekedar fakta sudah tak diinginkan lagi oleh masyarakat sekarang tidak memberikan jawaban gamblang, luas dan mendalam. Masyarakat ingin lebih jauh. Ingin tahu latar belakang dan kecenderungan yang akan terjadi.

Sebelum menuju laporan berita komprehensif yang menjadi andalan bagi laporan penulisan berita-berita pembangunan baiknya dilihat dulu sekilas penulisan berita yang biasa. Ialah berita laporan (jurnal) tentang fakta, sebab dasar-dasarnya umumnya sama.

Teknik penulisan dengan penjabaran dari Harorld D. Lasweel dengan: *who says what in what channel with what effect*, tetap menjadi patokan.

Pada intro atau teras berita setidaknya tiga di antara unsur hasil penjabaran dari Harold D. Lasweel harus dipergunakan. Elemen terakhir yaitu How memang mungkin tidak selalu dipergunakan pada teras berita lebih-lebih pada jurnal pembangunan.

Penulisan berita memperlihatkan pula beberapa sifat tertentu yang harus menjadi pegangan semua media massa. Beberapa dasar yang menjadi pegangan sebelum penulisan adalah melakukan seleksi, hal tersebut antara lain:

1. Pentingnya peristiwa atau kejadian (*important*)
2. Masih baru atau hangat (*actual-termasa*)
3. Menarik untuk disiarkan (*interest*)
4. Layak untuk dipublikasikan (*reliable*)

5. Sifat aman dari berita

Unsur nomor empat dalam Jurnalistik Pembangunan adalah penting sekali. Selain dari masalah yang harus diperhatikan ialah; Pers nasional yang bertanggung jawab maka ada hal yang lebih jauh lagi: idealisme pembangunan itu harus melihat keadaan masyarakat. Harus berpikir lebih jauh sebab Jurnalistik Pembangunan bermaksud mengarahkan dan membimbing pada suatu sikap mental yang baru untuk perbaikan-perbaikan. Hingga tidak diharapkan hal-hal yang bisa merisaukan atau membuat rasa gelisah.

Kini apa saja yang menjadi unsur pokok dalam pemberitaan, pada semua media massa penulisannya tetap pula dengan memperhatikan unsur-unsur:

- Ketepatan penulisan (*accuracy*)
- Ringkas-jelas (*brevity-clear*)
- Sederhana/simple (*simplicity*)
- Layak dan dipercaya (*sincerity*)
- Bahasa yang benar/terang (*bright language*)

Pada penulisan Jurnalistik Pembangunan sekali lagi perlu diingatkan nalar pembaca (*sence of audience*). Selain unsur di atas perlu diingat bahwa antara media cetak dengan elektronik ada sedikit perbedaan dalam penyajian meskipun nantinya sama-sama mempergunakan teknik piramida terbalik. Ialah pada televisi dan radio sulitlah dan membuat ketidakjelasan bila mempergunakan kalimat terbalik (*inverted sentence*). Hingga pemaparan secara teratur menjadi keharusan agar audience tidak

bingung mengingat pula waktu yang sedemikian singkat dan tidak ada pengulangan pada saat yang dekat.

Apakah yang dimaksud dengan teknik piramida terbalik tidak lain: mendahulukan yang paling penting atau hangat. Meletakkannya pada teras berita atau *lead* atau *intro*. Baru kemudian dipaparkan masalahnya –hubungan masalah itu-hal yang menjadi latar belakang terakhir detail-detailnya.

Menyajikan sebuah berita pada media massa yang pertama harus diperhatikan: sajikan atau kemukakanlah dahulu apa yang paling menarik atau penting. Sebab sebuah berita dalam penyajiannya bersifat edukatif. Barulah kemudian dipaparkan hal-hal lain menurut urutan pertimbangan yang logis pada detail-detailnya. (Rochimah Parapat, 1985: 29-31).

BAB VI

TEORI AWAL PEMBANGUNAN

A. Teori-Teori Pembangunan

Pembangunan sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana menjadi menonjol sejak selesainya perang dunia II. Dengan merdekanya bangsa-bangsa yang tadinya berada di bawah jajahan negara kolonial, maka sejak itu pulalah mereka mulai berkesempatan untuk membenahi nasib masing-masing, dalam arti membangun negara dan kehidupan rakyatnya. Dalam pandangan Barat, pembangunan secara umum bermula atau dipengaruhi oleh profram pemerintah Amerika Serikat akan melaksanakan suatu program baru yang tangguh berupa bantuan tehknik dan keuangan bagi negara-negara miskin di dunia. Sekarang dikenal orang dengan Marshall Plan yang merupakan bantuan Amerika Serikat untuk membangun kembali negara-negara sekutunya di Eropa yang hancur akibat perang Dunia II. Yang akhirnya kebijakan tersebut diikuti oleh negara-negara kaya lainnya, dan juga oleh lembaga regional dan internasional yang memang dibentuk untuk keperluan itu.²

Negara yang baru merdeka tadi, pada umumnya berada dalam situasi yang kurang lebih sama, yaitu; kehidupan sosial ekonomi yang merana akibat penjajahan, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, keadaan pendidikan yang menyedihkan, kondisi kesehatan yang parah, dan lain sebagainya yang pada pokoknya dapat disebut sebagai keadaan yang tertinggal dari kemajuan. Dengan kenyataan yang

² Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, h. 23.

seperti itu, wajarlah di dunia terdapat dua macam keadaan di antara negara- negara yang ada itu, yaitu: negara besar yang keadaannya cukup makmur dan tidak begitu terpengaruh oleh perang dunia yang baru selesai, dan selainnya, yaitu sejumlah besar negara baru kemudian disebut dengan negara terbelakang (*underdevelped countris*), kurangsetuju (*les develoved*), atau sebutan yang halus negara sedang berkembang (*developing countris*). Dari sini kemudian timbul sejumlah konsep atau teori dan gagasan untuk menanggulangi perbedaan keadaan di antara kedua jenis negara tersebut. Bahkan bukan sekedar kebetulan, bahwa konsep atau teori tersebut memang datang dari negara maju.³

1. Teori Modernisasi

Teori Modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat (AS), sebagai produk sejarah tiga sejarah peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia II. *Pertama*, munculnya AS sebagai kekuatan dominan dunia. Sekalipun negara-negara Barat lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman semakin melemah setelah Perang Dunia II, AS justru menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an secara praktis AS mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia. *Kedua*, pada saat yang hampir bersamaan, terjadi perluasan gerakan komunitas sedunia. Uni Soviet

³ Ibid, h. 24.

mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai ke Eropa Timur, tetapi sampai juga di Asia, antara lain di Cina dan Korea. Ini secara tidak langsung mendorong AS Untuk memperluas pengaruh politiknya pada belahan dunia lain, selain Eropa Barat, sebagai salah satu upaya pembendungan ideologi komunisme. *Ketiga*, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan daerah jajahan negara-negara Eropa. Negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia seperti ini wajar jika elit politik Amerika Serikat memberikan dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan sosialnya untuk mempelajari permasalahan Dunia Ketiga. Kebijakan ini diperlukan sebagai langkah pendahuluan untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik dunia. Ketiga dalam rangka menghindari kemungkinan terpengaruh dan/atau jatuhnya negara yang baru merdeka tersebut di pangkuan Uni Soviet (Suwarsono dan So, 2006: 7-8).

Masa sebelum Perang Dunia II, persoalan pembangunan negara Dunia Ketiga hanya sedikit sekali mendapat perhatian para ilmuwan AS, namun keadaan yang sebaliknya terjadi setelah Perang Dunia II. Dengan bantuan melimpah dari pemerintah AS dan organisasi swasta, satu generasi baru ilmuwan politik, ekonomi, dan para ahli sosiologi, psikologi, antropologi, serta ahli kependudukan menghasilkan karya-karya disertasi dan monograf tentang Dunia Ketiga. Satu aliran pemikiran

2. Teori Sosiologi Pembangunan

Di abad ke-19, masyarakat di Eropa dan Amerika Utara sedang diubah dari masyarakat pedesaan, yang berlatar belakang agrikultur untuk industri yang lebih berkarakter. Ahli teori sosial selama waktu ini mempunyai kaitan dengan adanya pergolakan dari masyarakat dan format sosial yang baru timbul dan industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi (Melkote, 1991:38).

Usaha ilmiah ini muncul dalam berbagai teori pada evolusi sosial. Portes (dalam Melkote, 1991:38-39) mencatat bahwa Morgan, Comte, Spencer, Kidd, dan Ward menjadi penagjur dari perspektif evolusioner di dalam masyarakat sosial. Di dalam teori pengembangan mereka, perubahan bentuk kultur dibandingkan kepada evolusi organisme sebagai pelafalan di dalam ilmu pengetahuan biologi. Dengan kata lain, ahli teori ini melihat perbedaan sangat kecil di dalam sejarah evolusi suatu ras jenis biologi masyarakat sosial. Pertumbuhan kultur diikat, seperti pertumbuhan di organisme, pada satu rangkaian langkah-langkah tidak dapat diubah dan tidak bisa diacuhkan. Di dalam teori evolusi sosial ini, pengembangan masyarakat mengikuti suatu alur secara sepihak dan langkah-langkah pertumbuhan universal yang utama. Bagaimanapun, para ahli teori sosial sungguh transparan dengan perubahan bentuk historis dari negara-negara Barat. Di dalam model mereka, yang paling tinggi langkah evolusi atau pengembangan diwakili oleh majunya negara-negara Eropa pada abad ke-19 dan awal abadd ke-20.

3. Teori Evolusi

Sejak awal perumusan aliran pemikiran modernisasi secara sadar mencari suatu bentuk teori. Dalam usahanya menjelaskan persoalan pembangunan negara-negara Dunia Ketiga, perspektif ini banyak menerima warisan pemikiran dari teori evolusi dan teori evolusi telah terbukti mampu menjelaskan proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara Eropa Barat, selain juga mampu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara Dunia Ketiga dalam proses modernisasinya. Pemikiran struktural fungsionalisme ke dalam teori modernisasi terjadi lebih disebabkan oleh kenyataan, bahwa sebagian besar pendukung utama teori modernisasi, seperti Daniel Lerner, Mrion Levy, Neil Smelser, Samuel Eisentadt, dan Gabriel Almond, lebih banyak terdidik dalam aliran pemikiran struktural-fungsionalisme, sewaktu mereka masih dalam bangku kuliah dahulu. Oleh karena itu, akan bermanfaat apabila sebelum menyampaikan secara detail konsep-konsep pokok teori modernisasi, disampaikan terlebih dahulu secara singkat pola pikir teori evolusi dan teroi fungsionalisme (Suwarsono dan So, 2006:9).

Charles Darwin klasik *On the Origin of species* (1859) menjadi inspirasi untuk perubahan pandangan sosial yang evolusioner. Bagaimanapun, Disertasi Darwin dapat digunakan untuk sejarah evolusi jenis ras. Ia berargumentasi bahwa semua organismen telah meningkat dari format lebih sederhana dan bahwa arah evolusi biologi unilinear yang umum, yaitu ke arah format lebih rumit. Awalnya ahli teori sosial dari sekolah *evolutionis* menerapkan gagasan Darwin kepada proses

modernisasi masyarakat sosial. Ahli teori yang semakin terkenal, ini adalah Herbert Spencer dan William Sumner. Spencer genap menerapkan prinsip Darwin yang terkenal menyangkut pertahanan dari yang *fittest* ke kultur manusia. Ia mengklaim masyarakat Barat itu pandai daripada semua ras lain dan telah melampaui sebab mereka menyesuaikan diri dengan lebih baik menghadapi kondisi yang sedang berubah-ubah dalam proses modernisasi masyarakat. Sekolah pikiran ini, memasukkan Teori Sosial Darwin, menang dalam penerimaan antara intelektual di akhir abad ke-19 (Berger, Ryan, Robertson, dalam Melkote. 1992:39). Teori evolusi sosial mempengaruhi dan menimbulkan hipotesis dan konsep penting di dalam pengembangan sosiologi. Bagaimanapun, teori yang lebih awal adalah bersifat menjelaskan untuk perubahan bentuk historis dari Barat, teori yang lebih baru di abad ke-20 digunakan untuk membandingkan pengembangan negara-negara Dunia Ketiga dengan Eropa dan Amerika Utara (Melkote, 1991:39).

Teori evolusi lahir pada awal abad ke-19 sesaat sesudah revolusi Industri dan Revolusi Perancis yang merupakan dua revolusi yang tidak sekadar menghancurkan tatanan lama, tetapi juga untuk membentuk acuan dasar baru. Revolusi industri menciptakan dasar-dasar ekspansi ekonomi. Dengan dilandasi semangat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dirumuskan tata cara baru produksi barang yang lebih efisien, yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan produktivitas dan perluasan pasar dunia. Revolusi Perancis meletakkan kaidah-kaidah pembangunan politik yang berdasarkan keadilan, kebebasan dan demokrasi. Dalam mengamati

perubahan ekonomi, politik dan sosial yang radikal ini, para teoritis menggunakan berbagai label dan kategori teoritis yang berbeda untuk menggambarkan ciri-ciri dan struktur masyarakat lama yang telah runtuh dan tatanan masyarakat baru yang sedang terbentuk. Ferdinand Tönnies menggunakan istilah *Gemeinschaft* (komunitas) dan *Gesellschaft* (masyarakat). Durkheim mengamati dengan solidaritas mekanik dan organik, dan Comte mengujinya dengan tiga tahapan perkembangan terkenalnya: teologi, metafisik, dan positif (Suwarsono dan So, 2006: 9-10).

Pada garis besarnya, teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai berikut: *Pertama*, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Dengan kata lain, masa depan masyarakat dunia sudah jelas dan dapat diramalkan, yakni pada suatu ketika kelak, dalam masa peralihan yang relatif panjang, dunia akan menjadi masyarakat maju. *Kedua*, teori evolusi membaurkan antara pandangan subyektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan, yang mengandung semua unsur yang disebut dengan *baik* dan *sempurna*. Di dalamnya terdapat apa yang oleh teori evolusi disebut sebagai kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi. Teori evolusi juga beranggapan bahwa perubahan sosial berjalan secara perlahan dan bertahap.

Perubahan ini dari masyarakat sederhana (*primitive*) masyarakat modern (*complex*) (Suwarsono dan So,2006:10).

4. Tradisi Versus Modernisasi

Model yang lebih awal didasarkan pada suatu konsepsi dikotomi tradisi versus modernisasi (Eisentadt, dalam Melkote, 1991:39). Teori ini sangat utama berkutub dua dimana langkah-langkah universa di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal dikurangi menjadi tipe ideal titik akhir. Tipe ideal ini ekstrem, bagaimanapun, deskriptif untuk permulaan dan titik akhir proses perubahan bentuk sosial dari negara-negara di Eropa dan Amerika Utara. Portes (dalam Melkote, 1991:39) mencatat bahwa ahli teori di dalam teori ini adalah lebih sedikit terkait dengan mencakup keseluruhan sejarah umat manusia dibanding dengan berusaha mengerti momen itu dari transisi Eropa dari suatu agrikultural feodal pada suatu industri kapitalis.

Semua teori ini, langkah yang lebih awal menjadi masyarakat yang tradisional adalah konseptual sebagai masyarakat kecil, beberapa pendekatan di mana semua orang mengenai satu sama lain, di mana hubungan antarpribadi adalah dekat dengan kekerabatan dan kesetiakawanan kelompok kuat. Langkah akhir, pada sisi lain, adalah suatu masyarakat besar, beberapa berkenaan dengan kota di mana hubungan antarpribadi bukan perseorangan, di mana kesetiakawanan kelompok dan menutup kekerabatan. Konsep masyarakat ini adalah sebagai asosiasi orang-orang

lepas dan di mana tradisi dan membagi bersama norma-norma dan nilai-nilai tidak lagi mempunyai suatu pengaruh dominan. Juga, di dalam teori ini, secara yakin di dalam analisis Durkheim, keduanya jenis ideal dan yang berbeda atas dasar sosial mengikat organik dan mekanistik. Perubahan bentuk dari yang tradisional ke masyarakat yang modern memerlukan spesialisasi fungsional lebih besar dan pembedaan struktural (Melote, 1991:40).

5. Teori Fungsionalisme

Pemikiran Talcott Parsons, ketika pernah sebagai ahli biologi, banyak berpengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Baginya, masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia: *Pertama*, seperti struktur tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat menurut Parsons juga mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Untuk menggambarkan koordinasi harmonis antar kelembagaan tersebut. *Kedua*, karena setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang jelas dan khas, maka demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Parsons merumuskan istilah fungsi pokok (*functional imperative*) untuk menggambarkan empat macam tugas utama yang harus dilakukan agar masyarakat

tidak mati, yang terkenal dengan sebutan AGIL (*adaption to the environment, goal attainment, integration and latency*). Lembaga ekonom menjalankan fungsi adaptasi lingkungan, pemerintah bertugas untuk pencapaian tujuan umum, lembaga hukum dan agama menjalankan fungsi integrasi, dan yang terakhir, keluarga dan lembaga pendidikan berfungsi untuk pemeliharaan (Suwarsono dan So, 2006:10-11).

BAB VII

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENERAPANNYA

A. Bidang Pertanian

Di lapangan pertanian, penerapan komunikasi pembangunan sudah sejak lama dilaksanakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa penerapan yang mula-mula sekali adalah justru di lapangan ini, sekalipun pada masa itu belum dikenal istilah “komunikasi pembangunan”. Dalam praktek, kegiatan penyuluhan sudah ada sejak dulu.

Proyek Masagana 99

Proyek ini diresmikan Presiden Filipina (waktu itu) Marcos pada Mei 1973, melalui acara televisi secara nasional. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan produksi beras, dengan memberikan kredit, pinjaman, sarana pertanian, dan informasi mutakhir mengenai konsep dan praktek pertanian. Disebut juga sebagai “program survival”, karena Filipina ketika itu baru saja mengalami banjir di beberapa wilayah negaranya, dan kekeringan nasional pada 1972/73. Karena itu Marcos mengimbau segenap bangsanya untuk bekerja sama mensukseskan rencana peningkatan produksi beras yang pada saat itu dipandang sebagai suatu penanggulangan terhadap ancaman ekonomi nasional yang antara lain ditandai oleh kekurangan beras yang diperkirakan mencapai 700.000 ton per tahun.

Khalayak sasaran proyek ini adalah para petani padi di 59 provinsi yang ada, dengan jumlah kurang lebih 900.000 orang. Perintisan proyek dilaksanakan pada 1971-1973, kemudian dilaksanakan sejak tahun itu hingga sekarang.

Sponsor proyek ini adalah Dewan Makanan dan Pertanian Nasional Filipina, yang terdiri dari 17 lembaga pemerintah, termasuk bank. Ikut juga mensponsori, USAID dan IRRI.

Dilihat dari jumlah petani yang dilibatkan, tingkat kesertaan pemerintah dan swasta, luas geografis, penggunaan media massa, pengendalian para penyuluh pertanian yang terlatih, penyebaran teknologi pertanian yang baru, maka proyek ini merupakan yang terbesar dan paling menyeluruh dalam sejarah Filipina.

Media yang digunakan dalam proyek ini adalah radio, komik, brosur, selebaran, bulletin, majalah berbahasa lokal, surat kabar, televisi, dan komunikasi antarpribadi.

Proyek Masagana 99 mempunyai sebelas komponen yang terdiri dari:

1. Paket teknologi yang didasarkan pada penelitian.
2. Suatu program produksi dan distribusi bibit.
3. Suatu sistem alokasi dan distribusi pupuk.
4. Suatu program kampanye yang ditujukan untuk mengendalikan hama tanaman dan serangga.
5. Suatu program kredit.

6. Suatu program pendistribusian pompa irigasi ataupun perbaikan sistem pengairan yang ada.
7. Peningkatan jumlah dan jangkauan penyuluh pertanian keliling.
8. Suatu kampanye media massa untuk menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat mengenai konsep-konsep dan praktek-praktek pertanian.
9. Suatu sistem dukungan harga yang dikaitkan dengan pembelian dan penyimpanan hasil produksi.
10. Sistem administrasi dan lintas sektoral yang difokuskan pada wilayah sasaran yang dirumuskan dengan teliti, dan
11. Suatu unit manajemen yang bertugas untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring keseluruhan program.

Dalam proyek ini, radio merupakan media utama, karena menurut hasil penelitian radio menjangkau 85 persen populasi petani, setiap 3 dari 4 rumah tangga petani di negara itu memiliki radio transistor. Untuk proyek ini, lebih dari 224 stasiun radio menyiarkan petunjuk, jingle (lagu singkat seperti iklan), dan skit (lakon pendek yang lucu) mengenai pertanian, sepuluh kali sehari. Di samping itu 125 stasiun radio menyelenggarakan lebih dari 50 program pertanian dalam acara-acara siarannya.

Sebagai media penunjang yang utama adalah komik instruksional, brosur, dan bulletin dalam 8 dialek bahasa daerah yang utama, surat kabar (yang dengan sukarela menyediakan halaman yang cukup luas untuk berita-berita proyek), dan poster-poster

promosi bersifat instruksional. Peranan TV terbatas terutama pada peliputan pembukaan proyek dan aktivitas tertentu di lapangan.

Para penyiar pertanian dalam proyek ini lebih merupakan "*disc jockey*". Mereka berperan sebagai petugas informasi pada Komite Aksi Propinsi (Unit administrative proyek yang paling bawah), untuk menjawab pertanyaan dari khalayak, merekam wawancara dengan para pemberi dan pengguna informasi, melakukan penelitian yang berkenaan dengan penyiaran, dan menghadiri aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan produksi bahan makanan. Selain itu, mereka bertugas menjaga jadwal siaran harian, bertemu dengan pejabat penyiaran provinsi setiap minggu untuk merencanakan dan mereviu program, dan selalu mengikuti aktivitas informasional dan edukasional seluruh lembaga pertanian dan pembangunan desa.

Pada 1997, proyek ini member penekanan pada pelaksanaan peningkatan hasil termasuk peningkatan jumlah keluarga petani yang berpartisipasi. Sejak itu proyek ini dikenal sebagai "Masagana 99 + 10".

Hasil

Terlepas dari problem transportasi, cuaca, hambatan distribusi, dan penularan hama, hasil padi di wilayah Masagana 99 telah meningkat secara dramatis. Pada 1973-1974 produksi padi di wilayah proyek meningkat 28 persen, kemudian pada 1975 sebesar 29 persen, dan pada 1976 meningkat 38 persen.

Sebagai contoh, hasil yang dicapai di wilayah proyek pada 1974/75 adalah 3.3 ton per hektar, sedang di wilayah nonproyek adalah 0.77 ton per hektar.

Proyek *Basic Village Education (BEV)*

Proyek ini didisain untuk menguji keefektivan aneka intervensi komunikasi di pedesaan Guatemala, dan telah menyumbangkan hasil-hasil yang konklusif bagi para perencana pertanian tentang kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi adopsi praktek-praktek pertanian yang baru. Kegiatan itu telah dilaksanakan di dua lingkungan kultural yang berbeda yaitu: penduduk Indian dan non-Indian, dibandingkan dengan suatu daerah kontrol (*control area*).

Intervensi (bentuk) komunikasi yang diujikan adalah: radio secara sendirian, pesawat TV umum desa saja, radio plus pesawat TV umum, dan radio plus pesawat TV umum plus petugas penyuluh.

Evaluasi proyek BE menunjukkan bahwa masing-masing intervensi media tadi mempunyai dampak positif pada khlayak sasaran. Pada daerah yang relatif sudah lebih berkembang, tingkat adopsi informasi yang baru melalui radio saja ternyata lebih tinggi dari daerah pedalaman yang lebih jauh, yang keadaannya kurang berkembang. Tetapi sebenarnya tidak ada suatu media tunggal ataupun kombinasi pun yang dapat dijamin pasti ampuh untuk segala situasi.

Dari proyek BE dipelajari, bahwa penggunaan pertanian dapat dipercepat dengan menambahkan siaran radio yang dikembangkan dengan cermat, berorientasi musim, kepada suatu program penyuluhan yang telah ada.

B. Bidang Keluarga Berencana

Sektor ini agaknya dapat disebut sebagai aktivitas yang paling serius hubungannya dengan komunikasi. Memang dapat dilihat dan dirasakan bahwa setidak-tidaknya satu dekade belakangan ini, kegiatan komunikasi keluarga berencana (KB) merupakan aktivitas yang paling gencar dan intensif dilakukan di mana saja di negara sedang berkembang. Ada beberapa penyebab intensifnya kegiatan komunikasi di lapangan KB, yaitu:

- a. Belajar dari keberhasilan yang dicapai pada bidang yang lain, seperti pertanian, pendidikan, dan sebagainya.
- b. Mendesaknya prioritas masalah kependudukan bagi sebagian besar negara sedang berkembang.
- c. Tersedianya dana dan sumber (*resources*) yang bukan saja cukup, bahkan berlimpah, dari badan-badan internasional seperti Bank Dunia, *Population Council*, *Rockefeller Foundation*, dan lain sebagainya.

Secara garis besar, kegiatan komunikasi KB berkisar pada beberapa hal yang pokok, yaitu:

1. Menanamkan pengertian bahwa jumlah anak perlu dikendalikan atau direncanakan.
2. Mengubah persepsi bahwa semakin banyak anak berarti banyak rezeki.
3. Mendidikkan keterampilan menggunakan alat kontrasepsi.
4. Mengubah sikap dan perilaku yang berkenaan dengan usia perkawinan.

Social Marketing Kontrasepsi

Merupakan salah satu aktivitas komunikasi yang diterapkan di lingkungan KB, khususnya dalam memasyarakatkan alat-alat kontrasepsi. Program social marketing di lingkungan KB merupakan upaya untuk memanfaatkan teknik-teknik dan sumber-sumber komersial untuk mencapai tujuan sosial dalam hal tersedianya lebih luas perlengkapan, informasi dan pelayanan KB. Tujuan yang mendasar dari kegiatan ini adalah menyediakan alat kontrasepsi secara efisien, ekonomis, dan nyaman bagi orang-orang yang akan menggunakannya.

Berbagai nama telah digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang mencakup social marketing, seperti distribusi komersial, pemasaran kontrasepsi, penjualan eceran komersial, dan distribusi berdasarkan komunikasi. Istilah social marketing menggambarkan esensi dari kegiatan ini, yaitu melayani kepentingan sosial melalui teknik-teknik pemasaran.

Sebenarnya penjualan produk kontrasepsi secara komersial bukan hal yang baru dan sudah bermula dalam skala yang besar, sejak seabad yang lalu. Namun

jauh dari diterima, justru penjualan dan publisitas tentang *spermicides*, creams, dan *douches* pada mulanya ditentang oleh para tokoh media dan agama, dan di banyak tempat dilarang oleh hukum. Namun demikian distribusi produk ini secara komersial telah memainkan peranan yang penting dalam tradisi demografis ke penurunan angka kelahiran di negara-negara maju.

Manakala kebutuhan dunia akan pengendalian fertilitas secara sukarela bertambah jelas pada pertengahan abad ke-20, metode kontrasepsi baru yang lebih efektif dan dapat diterima seperti kontrasepsi oral, IUD, dan sterilisasi, memerlukan supervise medis yang lebih intensif. Karenanya program KB yang dimulai pada 60-an oleh pemerintah di negara maju dan negara berkembang memberi titik berat pada pelayanan ibu dan kesehatan anak di klinik. Tak lama kemudian jelas kelihatan bahwa pelayanan kesehatan saja tidak dapat mencapai sasaran yang sebenarnya, dan harus saling melengkapi antara pendekatan kesehatan masyarakat dan komersial.

Di negara berkembang, fasilitas kesehatan sangat miskin peralatannya, dan penuh sesak, dokter masih jarang, khususnya di pedesaan, tempat sebagian besar penduduk berada. Wanita yang ingin merencanakan keluarganya tidaklah berarti harus sakit dulu sehingga memerlukan pelayanan klinis. Mereka yang mampu membeli pil atau kondom di kedai setempat sering lebih suka cara tersebut daripada harus menunggu lama di klinik.

Beberapa studi pada akhir 60-an mengundang perhatian kepada peran yang dapat dilakukan oleh sektor komersial dalam penyebaran alat-alat kontrasepsi.

Sebagai contoh, suatu studi yang meninjau pola penggunaan kontrasepsi di enam negara berkembang memperlihatkan bahwa, meskipun di suatu tempat ada program nasional KB, sekitar 40 persen masyarakat yang menggunakan kontrasepsi membelinya dari sumber-sumber komersial. Pada awal 70-an, suatu survei menemukan bahwa kecuali di tiga negara dari 13 negara yang diteliti, sektor komersial mensuplai lebih dari separoh kontrasepsi yang digunakan di negara tersebut.

Proyek-proyek *social marketing* kontrasepsi merupakan suatu “*social action program*” atau program aksi sosial yang dicangkokkan ke dalam distribusi sosial dan pemasaran dari sarana KB tersebut. Tujuannya adalah menumbuhkan suatu pasaran missal bagi kontrasepsi yang dijual dengan harga terendah yang layak. Pada dasarnya *proyek social marketing* dalam program KB adalah,

- mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual suatu produk kontrasepsi
- kepada konsumen
- melalui jalur pengecer yang telah ada
- dengan harga yang relatif rendah dan subsidi
- untuk mencapai suatu tujuan sosial yang diakui, yakni memperluas penggunaan kontrasepsi.

Ada delapan langkah penting dalam program *social marketing* kontrasepsi, yakni:

1. menegakkan prosedur manajemen dan operasi
2. memilih produk yang akan dipasarkan
3. mengidentifikasi populasi konsumen
4. menetapkan nama (merek) barang dan *packaging*
5. mengatur harga yang tepat
6. merekrut penjual pengecer
7. menata dan memelihara suatu sistem distribusi, dan
8. melaksanakan promosi

C. Bidang Pendidikan

Proyek Radio Mathematics

Proyek ini merupakan suatu eksperimen yang didisain menyelidiki kelayakan penggunaan radio sebagai suatu medium pembelajaran (instruksional) dalam mengajarkan matematika untuk siswa sekolah dasar. Proyek ini dilaksanakan di Nicaragua pada pertengahan tahun 1974 sampai dengan awal 1979, oleh Stanford University yang dikontrak oleh United States Agency for International Development (USAID).

Yang dilakukan ketika itu adalah mengembangkan pelajaran matematika untuk kelas 1 sampai 4 SD. Pelajaran tersebut terdiri dari siaran radio setiap hari

ditambah dengan aktivitas purna-siaran yang dilaksanakan oleh guru kelas. Dari aktivitas tersebut didapatkan bukti-bukti bahwa program ini meningkatkan pencapaian murid di bidang mata pelajaran matematika. Di samping itu, biaya pelaksanaannya dalam skala luas kemudian dinilai masih terjangkau oleh anggaran belanja Nicaragua.

Keberhasilan radio Mathematics dapat disebutkan terletak pada gaya inovatif mata pelajaran yang disiarkan, yaitu gaya yang bercirikan “interaktif” dalam komunikasi yang bersifat percakapan antara guru dan murid. Setiap pelajaran yang dikembangkan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang disiarkan, dan bagian yang tidak disiarkan (dilaksanakan guru). Kedua bagian tersebut saling melengkapi, dan isinya yang dipisahkan bermaksud untuk memanfaatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing, yaitu radio dan guru.

D. Bidang Kesehatan

Penerapan komunikasi pembangunan di bidang kesehatan, termasuk yang intensif perkembangannya. Di lapangan ini sudah dikenal istilah “*health communication*” atau komunikasi kesehatan, yang pada dasarnya merupakan penerapan komunikasi pembangunan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

a. Proyek *Sante 'pour Tous* di Zaire

Proyek ini berfokus pada pelayanan kesehatan primer dan pengobatan preventif yang disponsori oleh Departemen Kesehatan Zaire dan USAID, dan dilaksanakan

oleh l'Eglise du Christ du Zaire. Termasuk ke dalam programnya adalah, kampanye vaksinasi, proyek keluarga berencana, serta promosi pertanian dan gizi.

b. Proyek Media Massa dan Praktek Kesehatan di Gambia dan Honduras

Proyek ini mempunyai tiga komponen utama, yaitu:

1. Problem kesehatan yang spesifik
2. Seperangkat sarana instruksional yang telah tertentu
3. Suatu proses pengembangan instruksional yang sistematis

ad. 1 Masalah kesehatan meminta proyek untuk menggerakkan baik perilaku pencegahan maupun perawatan yang berkaitan dengan diare bayi yang akut, terutama di daerah pedesaan. Pilihan perilaku perawatan yang tepat relatif kecil dan terdapat suatu kontroversi yang cukup berarti di kalangan ahli media mengenai cara yang pasti mengenai bagaimana mempromosikan alternatif ini pada level komunitas. Proyek ini bertujuan menurunkan angka kematian bayi dengan mempromosikan terapi rehidrasi oral melalui fasilitas kesehatan yang ada, para petugas Puskesmas, dan rumah tangga.

Memilih perilaku pencegahan yang salien (benar-benar tepat) menimbulkan masalah, karena amat besarnya jumlah titik-titik kontaminasi yang potensial pada suatu desa. Akibatnya perilaku pencegahan yang merupakan perhatian khusus bagi komunitas kesehatan –ASI, penyiapan makanan, dan higienik perseorangan- menjadi sasaran.

ad. 2 Sarana instruksional dasar dalam proyek ini terdiri dari radio yang dikombinasikan dengan bahan-bahan grafis dan beberapa dukungan face to face dan para petugas kesehatan dan pemimpin opini setempat. (Nasution, 2004: 174-185, 205-207).

BAB VIII

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Komunikasi Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Pembangunan biasanya akan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, hak-hak asasi dan perserikatan. Komunikasi adalah suatu proses dengan nama seseorang (komunikator) menyampaikan stimuli (biasanya terdiri dari lambang kata-kata) untuk membentuk tingkah laku orang lain.

Jika ingin membicarakan definisi pembangunan, apabila kita telusuri dalam berbagai tulisan yang membicarakan aktifitas ini, selalu dikaitkan dengan istilah ; *modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, westernisasi, pertumbuhan (growth) dan evolusi sosio-kultural*. Menurut Frey, pengertian pertumbuhan (*growth*) terasa terlalu luas, sedangkan *industrialisasi* terlalu sempit. Begitupun dengan istilah *westernisasi* yang terasa sangat *parochial* (sempit wawasannya) dan meragukan. Yang paling populer diantara semuanya adalah istilah modernisasi dan pembangunan, yang menyebabkan kedua istilah itu sering kali dianggap sinonim dengan yang lainnya.

Rogers mengartikan pembangunan sebagai proses-proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi atau

lebih mencakup seluruh proses yang analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat *parsiatori* secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan dan kualitas yang dinilai tinggi lainnya) bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya.

Tahrani mengartikan istilah kemajuan (*progress*), pembangunan (*developmental*) dan modernisasi sebagai suatu fenomena *histories* yang sama, yaitu suatu tradisi dari masyarakat agraris kemasyarakat industrial. Arjomand berpendapat sebagai suatu konsep pembangunan menunjukkan *bias evolusioner*, sedangkan Berger memandang modernisasi sebagai suatu rangkaian fenomena historis yang jauh lebih spesifik yang diasosiasikan dengan tumbuhnya masyarakat –masyarakat industrial.

Beranjak kepada definisi Islam, beragam yang diberikan para pakar. Secara bahasa, At-Thabari mencatat pandangan-pandangan yang dianggapnya terkuat mengenai arti etimologi pembangunan dalam Islam tersebut,

1. *Al Khulush wa't-Ta'ari mina'l Afati azh Zhahirati awil Bathini*; (Bebas dan bersih dari penyakit lahir dan batin).
2. *As-Sulhu wa'Aman* (Damai dan tentram).
3. *At-Tha'atu wa'l-Idz'anu* (taat dan patuh).

Dikembangkan, dibangun dan dimanfaatkan. Mengingat pentingnya prinsip ini dapat dilihat pada Alquran 31: 20 dan 45 : 13. Bahkan dalam Alquran (16:12) Allah SWT menyatakan bahwa Allah bukan hanya menundukkan bumi dan isinya tetapi juga siang dan malam, bahkan bulan dan matahari serta bintang-bintang. Semua fenomena ini adalah ciptaan dan tunduk kepada Sang Maha Pencipta, dan ia menundukkannya (*Taskhir*) untuk kepentingan manusia.

Prinsip lainnya yaitu prinsip *tawazun*; keseimbangan atau *equilibrium*, dan ini menjadi pola penting dalam hidup seorang muslim. Seimbang jasmani dan rohani, fisik dan mental, material dan spritual, dunia dan akhirat sehingga seorang muslim tidak akan kering dan gersang serta memiliki arah tujuan yang jelas, termasuk dalam kegiatan komunikasi pembangunan. Secara menyeluruh prinsip *maslahat* (manfaat) dan menjauhi *mafsadat* (*mudharat*) adalah inti dari diturunkannya syariat Islam sebagai panduan hidup (*way of life*). Al-Syabiti pada masanya merumuskan hal ini dengan baik, beliau memberikan klasifikasi maslahat. Kepada tiga lapis ; *Dharuriyat* (*primer*), *Hajiyat* (*sekunder*) dan *Tahsinat* (*tertier atau assesoris*).⁴

Untuk lebih menghantarkan kepada pemahaman yang lebih *komprehensif* tentang islam perlu kita lihat ciri khusus agama islam (*khashaishul Islam*) sebagai suatu din yang mengatur segala aspek kehidupan, sekaligus terhadap persoalan komunikasi pembangunan. Berikut ciri khusus Islam tersebut. *Pertama*, Agama Allah, bersumber dari Allah SWT baik berupa wahyu langsung (Alquran) maupun

⁴ Nur Ahmad Fadil Lubis, *Islam dan Lingkungan Hidup*, seri makalah dalam pelatihan dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup. (medan: tt), h. 5-7.

tidak langsung (Sunnah) (39:2; 32:2). *Kedua*, mencakup segala aspek kehidupan (as-syumul) (2:208). *Ketiga*, berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman (*al-'ulum*) (4:3). *Keempat*, sesuai dengan fitrah manusia sampai akhir zaman (*al-'umum*) (4:3). *Keempat*, sesuai dengan fitrah manusia (30:30). *Kelima*, menempatkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya (7:179;31:20). *Keenam*, menjadi rahmat bagi sekalian alam (21:107). *Ketujuh*, berorientasi ke masa depan (akhirat) tanpa melupakan masa kini (dunia) (28:77). *Kedelapan*, menjanjikan *al-jaza'* (balasan) (98:6-8).

B. Etika dan Prinsip Komunikasi Pembangunan dalam Islam

Pengertian etika komunikasi dititik beratkan kepada pengertian tentang etika itu sendiri. Secara etimologi, kata etika diartikan sebagai :

1. Ilmu tentang apa yang baik, buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
2. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Apabila diambil pengertian yang kedua, maka etika komunikasi akan mengandung pengertian cara berkomunikasi yang sesuai dengan standart nilai akhlak. Pengertian ini lebih memiliki nuansa islami.

Berbicara tentang komunikasi yang islami memiliki pengertian komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai menurut norma agama yaitu menurut pandangan

Alquran dan As-Sunnah sebagai nilai-nilai yang mengukurnya. Komunikasi dalam islam tidak hanya diukur dari baik atau buruknya saja, namun juga memiliki standar benar atau salah. Deddy Mulyana dalam pengantar buku *etika komunikasi* karanangan Richard L. Johannesen, mengatakan bahwa etika adalah standar nilai moral yang mengatur perilaku kita, bagaimana kita bertindak dan mengharapkan kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ia berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Syahrin Harahap mengemukakan beberapa alasan mengapa masalah etika perlu dibicarakan, *pertama*, manusia pada zaman kita hidup dalam suatu masyarakat yang semakin *pluralistic*. Kedua, manusia pada zaman kita dihadapkan pada transformasi masyarakat yang luar biasa, dimana perubahan yang terjadi akibat hantaman gelombang modernisasi yang tak terelakkan sehingga mampu mengubah budaya dan rohani manusia banyak. Ketiga, sebagai akibat dari semua itu, seringkali muncul tindakan subjektif, motivasi yang tak jelas pamtrih, banyak yang terbiasa dengan sikap hipokrit (munafik) ; berkata 'ya' untuk mengatakan 'tidak' dan berkata 'tidak' untuk mengatakan 'ya'.

Dalam Alquran dikemukakan panduan yang jelas sebagai landasan etik dalam berkomunikasi. Pertama, amanah, aspek kejujuran atau obyektifitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada fakta, kejujuran ini dinamakan

amanah terambil dari kata 'amuna-ya' manuamanatan' yang artinya; tidak menipu (lihat QS. An-Nisa:58). Kedua, tidak melakukan dusta (ghair al Kizb). *Kizb* artinya dusta lawan dari kata *al-Sidq* (benar). Dalam Islam dusta dilarang karena akan membawa malapetaka pada orang lain yang menerima informasi (lihat QS. An-Nahl : 116). Ketiga, adil, seseorang diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil artinya berkomunikasi secara profesional tidak memihak dan tentunya sesuai dengan hak-hak seseorang (lihat QS. Al An'am : 152)0.

Prof. Madya Dr. Saodah Wok Dkk dalam bukunya teori-teori komunikasi menyatakan komunikasi terambil dari bahas arab *Ittisal* (lihat QS. Al Baqarah : 51) menyatakan kata tersebut juga semakna dengan berkata (Al Maidah :115), bacalah (QS. Al-Alaq :1), sampaikan (QS. Al Maidah:67), menyeru (QS. Ali Imran: 164), berpesan-pesan (QS. Al-Asr:3), bertanya (QS. Al Maidah : 4), dengarkanlah (QS. Al-Maidah: 108 dan doa (QS. At-Taubah: 103). Mereka menyatakan komunikasi yang memiliki ruang lingkup; komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama dan Komunikasi dengan diri sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memulakan percakapan dengan '*Assalamu' alaikum*'
2. Berbicara dengan lemah lembut
3. Menggunakan perkataan yang baik
4. Menyebut perkara yang baik-baik tentang orang lain
5. Menggunakan hikmah dan nasehat yang baik

6. Berbicara yang benar
7. Menyesuaikan bahasa dan isi perkataan dengan tingkat kecerdasan pendengar
8. Berdialog dengan cara yang lebih baik
9. Menyebut perkara yang penting berulang-ulang
10. Mengatakan apa yang diketahui
11. Mengambil pandangan dan pikiran orang lain (terbuka)
12. Berdo'a kepada Tuhan jika memikul tanggung jawab komunikasi yang besar.

Di samping beberapa etika dan prinsip komunikasi pembangunan dalam Islam. Penting untuk diperhatikan, dalam Alquran terdapat juga sejumlah prinsip penting yang mesti dijadikan sebagai panduan untuk tercapainya keberhasilan komunikasi secara efektif dan efisien. Beberapa prinsip tersebut meliputi; 1. Prinsip Perkataan yang membekas pada jiwa (*Qaulan Baligha*) 2. Prinsip perkataan yang lemah lembut (*Qaulan Layyina*) 3. Prinsip perkataan yang ringan (*Qaulan Maisura*) 4. Prinsip perkataan yang mulia (*Qaulan karima*) 5. Prinsip perkataan yang benar (*Qaulan Sadida*). 6. Prinsip perkataan yang pantas (*Qaulan Ma'rufan*) 7. Perkataan yang baik (*Falyaqul Khairan*).

1. *Qaulan Baligha* (perkataan yng membekas pada jiwa)

Alquran memberikan tuntunan, bahwa redaksi berkomunikasi berbeda-beda tekanannya, tergantung kepada siapa audiensnya (*mad'unya*). *Qaulan Baligha* dapat diartikan perkataan yang membekas pada jiwa hal ini bisa

dilihat dalam QS. An-Nisa: 63. Ayat ini lebih dikaitkan dengan menghadapi orang-orang munafik yang selalu berpura-pura (*hipokrit*), selalu menggunakan logika ambiguitas (lain di bibir lain di hati, lain diucapkan lain pula yang diperbuat).

Berbicara dengan orang munafik jika bahasanya salah bisa dijadikan mereka untuk meremehkan seorang da'i (komunikator), kerana itu komunikasi yang persuasif dengan kalimat yang tajam, pedas, tetapi benar baik bahasa dan substansinya membuat mereka tak berketik.⁵

2. *Qoulan Layyina* (perkataan yang lemah lembut).

Ungkapan ini dilihat dalam Alquran QS. Thoha: 43-44, yang menggambarkan tentang perintah (ringkasan kisah) Nabi Musa dan saudara yang membantunya Harun untuk menghadapi Fir'aun yang memiliki sifat sombong, sang tirani dan bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Perkataan yang lemah lembut perlu dilakukan jika berhadapan dengan penguasabercorak Fir'aun (tiran dan zalim). Alquran mengajarkan kepada kita, untuk menghadapi mereka harus bersifat lemah lembut, tidak kasar, dan lantang. Hal ini untuk menghindari respon yang keras dari dari komunikan yang kita tuju, hal yang demikian juga akan menghilangkan peluang kita untuk melakukan dialog.⁶

3. *Qoulan Maisura* (perkataan yang ringan)

⁵ Ahmad Mubarak, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Purtaka Firdaus, 2001), h. 184-185.

⁶ *Ibid*, h. 189.

Istilah ini dapat kita temukan dalam QS. Al Isra' : 28, kalimat maisura berasal dari kata yasr yang artinya mudah. Dalam komunikasi kata maisura dimaknai perkataan yang mudah diterima, ringan, tidak berliku-liku dan tidak bersayap, pesannya sederhana, mudah dimengerti dan dipahami secara spontan tanpa harus berpikir dua kali. Komunikasi seperti ini biasanya ditujukan bagi kalangan awam yang mereka tidak tertarik dengan rgumen dan logika, misalnya penduduk yang tinggal di daerah kumuh, pendidikan tertinggal, ekonomi tertinggal dan lain sebagainya.

4. *Qoulan Karima* (perkataan yang mulia)

Kata *qoulan kariman* dalam alquran disebutkan hanya satu kali, yaitu dalam surat *Al-isra'*. *“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan memyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”*.

Prinsip komunikasi dalam ayat tersebut mengajarkan kita dua hal: 1. Berkenaan dengan tuntutan berahklak kepada Allah, dan 2. Berkenaan dengan tuntutan berahklak baik kepada orangtua. Ahklak kepada Allah merupakan kunci utama dalam Islam. Menurut Hamka, bahwa ahklak kepada Allah merupakan pokok etika (ahklak) sejati, sebab hanya Allah semata yang

berjasa kepada kita, yang menganugerahi hidup kita, memberi rezeki, memberikan perlindungan dan juga akal.⁷

Prinsip ini juga mengajarkan kita etika pergaulan manusia kepada kedua orang tua, terlebih jika kedua orang tua sudah lanjut usia, hal ini dapat kita temukan dalam QS. Al-Isra': 23. Dalam perspektif komunikasi Islam *Qoulan Karima* diperlukan jika berhadapan dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, atau kelompok pensiunan/purnawirawan. Ungkapan ini juga dapat ditujukan kepada orang yang memiliki karisma/otoritas kewibawaan di masyarakat seperti ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat atau kalangan elit sosial yang memiliki status khusus di masyarakat. Dalam masyarakat minang misalnya *ninik mamak*, atau *hatobangon* dan *harajaon* pada masyarakat batak serta para kepala-kepala suku.

5. *Qoulan Sadida* (perkataan Yang benar)

Istilah *qoulan sadida* merupakan persyaratan umum suatu pesan komunikasi yang persuasif dan prepentif. Ungkapan ini ditujukan kepada siapapun kita harus berkomunikasi dengan benar (baik cara ataupun isi pesannya). Perkataan ini ditemukan dua kali dalam Alquran (QS. An-Nisa:9 dan QS. Al-Ahzab:70). Yang pertama berkaitan dengan membentuk generasi masa depan dan hukum waris, sedangkan yang kedua berkaitan dengan muatan pesan atau materi komunikasi (*maddah*).

⁷ Ujang Saefulloh, *Kapita Selektu Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Medika, 2007), h. 87.

6. *Qoulan Ma'rufan* (perkataan yang pantas).

Qoulan ma'rufan mengandung pengertian perkataan yang pantas. Di dalam Alquran ungkapan ini ditemukan sebanyak empat kali (QS. Al-Baqarah: 235, QS A-Nisa: 5 dan 8 serta QS. Al-Ahzab: 32). Ayat di atas menjelaskan seputar tata cara meminang perempuan dalam Islam, kata-kata dalam mendidik (edukatif) bagi orang yang belum dewasa (berbicara sesuai dengan tarap usia dan kemampuan akal), bagaimana membangun tenggang rasa dalam keluarga (jika ada anak yatim atau orang miskin ketika membagi harta warisan), juga berkaitan dengan tata cara berkomunikasi antara orang yang berlawanan jenis (seorang perempuan dilarang berbicara dengan suara yang mendayu-dayu jika berbicara dengan laki-laki, karena hal tersebut bisa membuat laki-laki terlena dan terbius. Hendaklah bagi perempuan berbicara dengan singkat, tegas, dan padat dalam berkomunikasi dengan laki-laki.

7. *Falyakul Khoiron* (berbicara yang baik).

Prinsip ini merupakan nilai substansional dari sebuah perkataan, agar mengandung kebaikan, manfaat dan berdampak konstruktif dalam membangun sebuah tatanan bermasyarakat dan berbangsa. Inti komunikasi dalam Islam bermuara pada prinsip ini sehingga di sinilah titik beda dengan komunikasi barat yang justru cenderung mengabaikan nilai-nilai normatif ini. Komunikasi dalam Islam selalu bercorak konstruktif dan mencegah sesuatu

yang destruktif, tidak seperti propaganda dan isu-isu murahan yang membuat kerugian. Islam mencela fitnah, *ghibah*, dan *zhon* (buruk sangka).

Prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya dapat dijadikan landasan bagi setiap muslim ketika melakukan proses komunikasi, baik dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah, maupun beraktivitas-aktivitas lainnya. Prinsip ni juga dapat membantu memelihara hubungan yang harmonis di antara sesama kita. Membangun komunitas sosial yang damai, tenteram dan sejahtera sehingga terbentuk peradaban manusia yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Jahi, Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Gramedia, 1988.
- Astrid S. Susanto, Komunikasi Sosial di Indonesia, Bandung: Binacipta, cet. ke-1, 1980.
- A.S. Achmad dan S.S Ecip, Komunikasi dan Pembangunan, Jakarta: Sinar Harapan, cet ke-1, 1985.
- Abdul Karim Batubara, Diktat Media Komunikasi, 2008.
- Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2, 2007.
- Eduard Depari dan Colin MacAndrews, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. ke 6, 1995.
- Ida Yustina dan Adjat Sudrajat, Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan, Bogor: IPB Press, cet. ke-1, 2003.
- Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. ke-1, 1993.

_____, Komunikasi, Teori dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. ke-18, 2004.

_____, Dinamika Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. ke-5, 2002.

Riyono Pratikto, Komunikasi Pembangunan, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

S. Rochimah Parapat, Jurnalistik Pembangunan, Medan: Kelompok Study Ilmu Publistik, 1985.

Syukur Kholil, Komunikasi Islam dan Tantangan Modernitas, Bandung: Citapustaka Media Perintis, cet. ke-1, 2008.

Zulkarimen nasution, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan teori dan Penerapannya, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. ke-5, 2004.

